

BUDAYA PENDIDIKAN INKLUSI

Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak yang lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Konsep pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang mempresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara. Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menampung semua anak berkebutuhan khusus ataupun anak yang memiliki kesulitan membaca dan menulis.

Kendati pendidikan inklusif terlalu luas untuk menampung segala aspek yang berkebutuhan khusus. Namun, ia merupakan suatu strategi yang dapat mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan inklusif menjamin akses dan kualitas anak sesuai dengan tingkat kemampuan dan menjamin kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan baik.

Dalam buku ini penulis memaparkan konsep pendidikan inklusi di Indonesia dan dimensi pembangunan budaya inklusi dalam roda pendidikan nasional sehingga membantu setiap praktisi pendidikan untuk mengambil langkah yang tepat dalam mengelola pendidikan untuk semua tersebut.



Penerbit
Nizamia Learning Center
Ruko Valencia AA 15 Gemurung, Gedangan - Sidoarjo
Telp. 031 - 8914874
Email : nizamiacenter@gmail.com



Dr. H. Amka, M.Si

BUDAYA PENDIDIKAN INKLUSI

BUDAYA PENDIDIKAN INKLUSI

Dr. H. Amka, M.Si



BUDAYA PENDIDIKAN INKLUSI

Penulis:

Dr. H. Amka, M.Si.



**Nizamia Learning Center
2022**

BUDAYA PENDIDIKAN INKLUSI

© Dr. H. Amka, M.Si.

Anggota IKAPI
Register 166/JTI/2016
All right reserved

Penulis:

Dr. H. Amka, M.Si.

Tata Naskah:

Rizki Janata

Tata Sampul:

Rizki Janata

Diterbitkan pertama kali oleh

Nizamia Learning Center

Ruko Valencia AA-15 Sidoarjo

Telepon (031) 8913874

E-mail: nizamiacenter@gmail.com

Website: www.nizamiacenter.com

Cetakan pertama, Januari 2022

iv + 131 hlm.; 15,5 cm x 23 cm

ISBN 978-623-265-710-6

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil 'alamiin*, penulis telah selesai menyusun buku dengan judul **Budaya Pendidikan Inklusi**. Buku ini disusun dengan harapan agar dapat menjadi referensi kepada setiap praktisi pendidikan inklusi dalam mengupayakan berjalannya pengelolaan pendidikan inklusif dengan baik

Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak yang lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Konsep pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang mempresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara. Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menampung semua anak berkebutuhan khusus ataupun anak yang memiliki kesulitan membaca dan menulis.

Kendati pendidikan inklusif terlalu luas untuk menampung segala aspek yang berkebutuhan khusus. Namun, ia merupakan suatu strategi yang dapat mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan inklusif menjamin akses dan kualitas anak sesuai dengan tingkat kemampuan dan menjamin kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan baik.

Dalam buku ini penulis memaparkan konsep pendidikan inklusi di Indonesia dan dimensi pembangunan budaya inklusi dalam roda pendidikan nasional. sehingga membantu setiap praktisi pendidikan untuk mengambil langkah yang tepat dalam mengelola pendidikan untuk semua tersebut. Penulis menyadari, bahwa penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran tetap diperlukan untuk penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I: PENDIDIKAN SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER	
A. Konsep Pendidikan.....	1
B. Peran Pendidikan dalam Pembentukan Karakter	21
C. Pembelajaran dan Kepribadian.....	28
BAB II : BUDAYA PENDIDIKAN INDONESIA	
A. Konsep <i>Life Skill Education</i>	37
B. Pendidikan Kecakapan Hidup dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Nasional	44
C. Ragam Jenis Pendidikan Kecakapan Hidup.....	47
BAB III: PENDIDIKAN INKLUSIF	
A. Resolusi Pendidikan.....	51
B. Konsep Pendidikan Inklusif.....	62
C. Pendidikan Inklusif Sebagai Praktek Pengembangan Mutu Pendidikan	71
BAB IV: WAJAH PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA	
A. Perkembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia	82
B. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Indonesia.....	92
C. Implikasi Manajerial Inklusif.....	93
BAB V: MERAJUT BUDAYA PENDIDIKAN INKLUSIF	
A. Pendidikan untuk Semua	96
B. Dukungan dalam Setiap Keragaman	106
C. Nilai Pembelajaran Ramah untuk Semua	113
D. Menggerakkan Roda Pendidikan Inklusif	120
DAFTAR PUSTAKA	126
PROFIL PENULIS	131

BAB I

PENDIDIKAN SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER

A. Konsep Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan berasal dari kata didik dan diberikan awalan dan akhiran pe- dan -an yang berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pendidikan>).

Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani yaitu “paedagogie”, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan “education” yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan “Tarbiyah” yang berarti pendidikan.

Banyak ahli yang memberikan pengertian atau definisi pendidikan, diantaranya adalah:

1. Definsi pendidikan menurut Brubacher

Menurut Burbacher (Modern Philosophies of Education) dalam Ahmadi (2014: 33), pendidikan merupakan seutau proses timbal

baik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam, teman, dan alam semesta. Pendidikan juga merupakan perkembangan yang terorganisasi dan kelengkapan dari semua potensi manusia; moral, intelektual, jasmani (pancaindra), dan kepribadian individu dan kegunaan masyarakatnya yang diarahkan demi menghimpun semua aktivitas tersebut untuk tujuan hidupnya (tujuan akhir).

2. Definisi pendidikan menurut Combs dan Ahmed

Menurut Combs dan Ahmed yang dikutip Ahmadi (2014: 36) menyatakan bahwa pendidikan sama dengan belajar, entah di mana, bagaimana, dan bilakah berlangsung pelajaran itu. Dengan demikian, pendidikan merupakan suatu proses yang berkesinambungan mulai dari usia anak kecil sampai pada waktu dewasa, dan karena itu pendidikan memerlukan beraneka ragam cara dan sumber belajar.

3. Definisi pendidikan menurut Ahmad D Marimba

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama (Hasbullah, 2012: 3).

4. Definisi pendidikan menurut Noor Syam

Noor Syam mendefinisikan pendidikan sebagai aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta, dan budi nurani) dan jasmani (pancaindra serta keterampilan-keterampilan) (Ahmadi, 2014: 37)

Menurut Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 23 Tahun 2003 mendefinisikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarkat, bangsa, dan Negara.

Pendidikan sebagai ilmu yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, karena didalamnya banyak segi-segi atau pihak-pihak yang ikut terlibat baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Adapun segisegi atau pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan Islam sekaligus menjadi ruang lingkup pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan mendidik itu sendiri.

Maksudnya adalah seluruh kegiatan, tindakan atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidikan sewaktu menghadapi atau mengasuh anak didik.

2. Anak didik

Yaitu merupakan obyek terpenting dalam pendidikan

3. Dasar dan tujuan pendidikan

Yaitu landasan yang menjadi fundament dan sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam yang dilakukan

4. Pendidik

Yaitu subyek yang melakukan pendidikan



5. Materi Pendidikan

Yaitu bahan-bahan, atau pengalaman-pengalaman belajar ilmu agama Islam

6. Metode Pendidikan

Yaitu cara yang paling tepat dilakukan oleh pendidikan untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan islam kepada anak didik

7. Evaluasi Pendidikan

Yaitu memuat cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar anak didik.

8. Alat-alat pendidikan

Yaitu alat-alat yang dapat digunakan selama melaksanakan pendidikan islam agar tujuan pendidikan islam tersebut lebih berhasil

9. Lingkungan sekitar atau millieu pendidikan

Yaitu keadaan-keadaan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan itu sendiri.

Pilar Pendidikan

Pilar merupakan sebuah penopang atau penyangga, dalam sebuah bangunan pilar yang dapat membuat bangunan berdiri tegak dan kokoh. Dalam sistem pendidikan juga demikian terdapat pilar yang menjadi penyangga sehingga sebuah sistem pendidikan dapat berdiri untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada saat ini

telah ada rumusan mengenai pilar tersebut yang paling terkenal adalah 4 (empat) pilar pendidikan yang dirumuskan oleh Unesco.

Namun pilar yang diungkapkan Unesco ini tidak mengakomodasi tujuan dari sistem pendidikan nasional di Indonesia yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara."

Dapat ditarik kesimpulan pilar pendidikan yaitu sendi pendidikan yang ditopang oleh semangat belajar yang kuat melalui pola belajar yang bervisi kedepan dengan melihat perubahan-perubahan kehidupan agar menjadi suatu yang utuh.

Ada 4 pilar-pilar pendidikan universal yang dirumuskan oleh UNESCO (Geremeck, 1986) yaitu, belajar untuk mengetahui (*learning to know*), belajar untuk melakukan (*learning to do*), belajar menjadi (*learning to be*), belajar dengan berkerjasama (*learning to live together*) merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap peserta didik.

1. *Learning to Know (belajar untuk menguasai)*

Learning to know mengandung makna bahwa belajar tidak hanya berorientasi pada produk atau hasil belajar, akan tetapi juga harus berorientasi pada proses belajar. Dalam proses belajar,



peserta didik bukan hanya menyadari apa yang harus di pelajari tetapi juga diharapkan menyadari bagaimana cara mempelajari apa yang seharusnya dipelajari. Kesadaran tersebut, memungkinkan proses belajar tidak terbatas di sekolah saja, akan tetapi memungkinkan peserta didik untuk belajar secara berkesinambungan. Inilah hakekat dari semboyan "belajar sepanjang hayat".

Apabila hal ini dimiliki peserta didik, maka masyarakat belajar (learning society) sebagai salah satu tuntutan global saat ini akan terbentuk. Oleh sebab itu belajar untuk mengetahui juga dapat bermakna belajar berpikir karena setiap individu akan terus belajar sehingga dalam dirinya akan tumbuh kemauan dan kemampuan untuk berpikir. Learning to know, dengan memadukan pengetahuan umum yang cukup luas dengan kesempatan untuk mempelajari secara mendalam pada sejumlah kecil mata pelajaran.

Pilar ini juga berarti *learning to learn* (belajar untuk belajar), sehingga memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan pendidikan yang disediakan sepanjang hayat. Tidak hanya memperoleh pengetahuan tapi juga menguasai teknik memperoleh pengetahuan tersebut. Pilar ini berpotensi besar untuk mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan intelektual dan akademik yang tinggi.

Secara implisit, learning to know bermakna belajar sepanjang hayat (*Life long education*). Asas belajar sepanjang hayat bertitik tolak atas keyakinan bahwa proses pendidikan dapat berlangsung selama manusia hidup, baik didalam maupun diluar sekolah. Sehubungan dengan asas pendidikan seumur hidup berlangsung

seumur hidup, maka peranan subjek manusia untuk mendidik dan mengembangkan diri sendiri secara wajar merupakan kewajiban kodrat manusia.

Dengan kebijakan tanpa batas umur dan batas waktu untuk belajar, maka kita mendorong supaya tiap pribadi sebagai subjek yang bertanggung jawab atas pendidikan diri sendiri menyadari, bahwa:

- a. Proses dan waktu pendidikan berlangsung seumur hidup sejak dalam kandungan hingga manusia meninggal.
- b. Bahwa untuk belajar, tiada batas waktu. Artinya tidak ada kata terlambat atau terlalu dini untuk belajar.
- c. Belajar/mendidik diri sendiri adalah proses alamiah sebagai bagian integral/totalitas kehidupan (Burhannudin Salam, 1997:207).

Konsep *learning to know* ini menyiratkan makna bahwa pendidik harus mampu berperan sebagai berikut:

Guru berperan sebagai sumber belajar Peran ini berkaitan penting dengan penguasaan materi pembelajaran. Dikatakan guru yang baik apabila ia dapat menguasai materi pembelajaran dengan baik, sehingga benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi anak didiknya. Guru sebagai Fasilitator Guru berperan memberikan pelayanan memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Guru sebagai pengelola Guru berperan menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman



2. *Learning to do (belajar untuk menerapkan)*

Learning to do mengandung makna bahwa belajar bukanlah sekedar mendengar dan melihat untuk mengakumulasi pengetahuan, akan tetapi belajar dengan dan untuk melakukan sesuatu aktivitas dengan tujuan akhir untuk menguasai kompetensi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kompetensi akan dapat dimiliki oleh peserta didik apabila diberikan kesempatan untuk belajar dengan melakukan apa yang harus dipelajarinya secara langsung.

Dengan demikian *learning to do* juga berarti proses pembelajaran berorientasi pada pengalaman langsung (*learning by experience*). *Learning to do*, untuk memperoleh bukan hanya suatu keterampilan kerja tetapi juga lebih luas sifatnya, kompetensi untuk berurusan dengan banyak situasi dan bekerja dalam tim.

Ini juga belajar berbuat dalam konteks pengalaman kaum muda dalam berbagai kegiatan sosial dan pekerjaan yang mungkin bersifat informal, sebagai akibat konteks lokal atau nasional, atau bersifat formal melibatkan kursus-kursus, program bergantian antara belajar dan bekerja.

Pendidikan membekali manusia tidak sekedar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh untuk terampil berbuat/ mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Sasaran dari pilar kedua ini adalah kemampuan kerja generasi muda untuk mendukung dan memasuki ekonomi industry (Soedijarto, 2010).

Dalam masyarakat industri tuntutan tidak lagi cukup dengan penguasaan keterampilan motorik yang kaku melainkan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan seperti “controlling, monitoring, designing, organizing”.

Peserta didik diajarkan untuk melakukan sesuatu dalam situasi konkrit yang tidak hanya terbatas pada penguasaan ketrampilan yang mekanitis melainkan juga terampil dalam berkomunikasi, bekerjasama dengan orang lain, mengelola dan mengatasi suatu konflik.

Melalui pilar kedua ini, dimungkinkan mampu mencetak generasi muda yang intelligent dalam bekerja dan mempunyai kemampuan untuk berinovasi. Sekolah sebagai wadah masyarakat belajar hendaknya memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan ketrampilan yang dimiliki, serta bakat dan minatnya agar “*Learning to do*” dapat terealisasi.

3. *Learning to be (belajar untuk menjadi)*

Learning to be mengandung arti bahwa belajar adalah proses untuk membentuk manusia yang memiliki jati dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendidik harus berusaha memfasilitasi peserta didik agar belajar mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu yang berkepribadian utuh dan bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat.

Dalam pengertian ini terkandung makna bahwa kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yakni makhluk hidup yang memiliki tanggung jawab sebagai khalifah serta menyadari akan segala kekurangan dan kelemahannya. *Learning to be*, sehingga



dapat mengembangkan kepribadian lebih baik dan mampu bertindak mandiri, membuat pertimbangan dan rasa tanggung jawab pribadi yang semakin besar, ingatan, penalaran, rasa estetika, kemampuan fisik, dan keterampilan berkomunikasi.

Konsep *learning to be* perlu dihayati oleh praktisi pendidikan untuk melatih siswa agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kepercayaan merupakan modal utama bagi siswa untuk hidup dalam masyarakat. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri (*learning to be*) (Atika, 2010).

Menjadi diri sendiri diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, belajar menjadi orang yang berhasil, sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri.

4. *Learning to live together (belajar untuk dapat hidup bersama)*

Learning to live together adalah belajar untuk bekerjasama melalui proses bekerjasama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat global dimana manusia baik secara individual maupun secara kelompok tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mengasingkan diri dari masyarakat sekitarnya.

Dalam hal ini termasuk juga pembentukan masyarakat demokratis yang memahami dan menyadari akan adanya perbedaan pandangan antar individu. *Learning to live together*,

learning to live with others, dengan jalan mengembangkan pengertian akan orang lain dan apresiasi atas interdependensi—melaksanakan proyek-proyek bersama dan belajar memenej konflik—dalam semangat menghormati nilai-nilai kemajemukan, saling memahami dan perdamaian.

Dari keempat pilar pendidikan di atas terlihat bahwa pilar *learning to live together*, *learning to live with others*, dalam konteks kemajemukan merupakan suatu pilar yang sangat penting. Pilar ini sekaligus juga menjadi pembenar pentingnya pendidikan multikultur yang berupaya untuk mengkondisikan supaya peserta didik mempunyai kemampuan untuk bersikap toleran terhadap orang lain, menghargai orang lain, menghormati orang lain dan sekaligus yang bersangkutan mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya serta orang lain.

Sehingga bila proses pembelajaran di sekolah diarahkan tidak hanya pada *learning to know*, *learning to do* dan *learning to be*, tetapi juga diarahkan ke *learning to live together*. Dalam kaitan ini adalah tugas pendidikan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran bahwa hakekat manusia adalah beragam tetapi dalam keragaman tersebut terdapat persamaan. Itulah sebabnya *Learning to live together* menjadi pilar belajar yang penting untuk menanamkan jiwa perdamaian.

5. *Learning to believe and convince the almighty God (Belajar untuk Beriman dan Bertakwa kepada tuhan YME)*

Dari pilar inilah Negara Indonesia akan mewujudkan cita-cita bangsanya yang termaktub dalam UUD 1945 Alinea ke-4 yaitu



mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha Esa.

Garis Besar Mengenai ke Lima Pilar Pendidikan UNESCO

a. Kekuatan

Ke empat pilar pendidikan tersebut dirancang sangat bagus, dengan tujuan yang bagus pula, dan sesuai dengan keadaan zaman sekarang yang menuntut peserta didik tidak hanya diajarkan IPTEK, kemudian dapat bekerja sama dan memecahkan masalah, akan tetapi juga hidup toleran dengan orang lain ditengah-tengah maraknya perbedaan pendapat dimasyarakat. Dengan ke kempat pilar ini akan bisa tercapai pendidikan yang berkualitas.

b. Kelemahan

Meskipun ke empat pilar pendidikan ini dirancang sedemikian bagusnya, namun perlu diingat, masih banyak aspek penghalang dalam pelaksanaan tersebut, seperti kurangnya SDM guru yang benar-benar “mumpuni”, perbedaan pola pikir setiap masyarakat atau daerah dalam memandang arti penting pendidikan, kemudian ada lagi fasilitas, fasilitas yang masih minim akan sangat menghambat kemajuan proses belajar mengajar, dan kendalakendala lain.

c. Peluang

Apabila pendidikan di Indonesia diarahkan pada ke empat pilar pendidikan ini, maka pada gilirannya masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat yang bermartabat di mata masyarakat dunia.

d. Ancaman

Ke empat pilar pendidikan UNESCO ini bisa menjadi bumerang bagi peserta didik dan pengajar apabila tujuan atau keinginan yang hendak dicapai tidak kunjung terwujud. Bisa jadi akan muncul sikap pesimis dan putus asa kehilangan kepercayaan diri.

Dalam konteks pemahaman tentang proses belajar-mengajar, guru dihadapkan pada sesuatu yang secara *conditio sine qua non* harus diaktualisasikan dalam bentuk pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan.

Fenomena yang berkembang di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar guru terbiasa mendesain pembelajaran yang “memenangkan” guru. Artinya, guru lebih senang dianggap sebagai satu-satunya sumber belajar bagi siswa (*teacher centered*).

Dalam kegiatan atau proses pendidikan terdapat komponen-komponen pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Komponen tersebut ialah :

1. Tujuan

Tujuan merupakan komponen pendidikan yang memiliki posisi penting dalam proses pendidikan. Berbagai macam tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pendidik supaya dapat dicapai oleh subjek didik.

Semua tujuan-tujuan itu harus normatif baik, artinya tidak bertentangan dengan hakekat perkembangan peserta didik dan dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Tujuan pendidikan ada yang sifatnya ideal dan ada yang sifatnya nyata. Tujuan yang sifatnya ideal biasanya dirumuskan dalam bentuk tujuan



pendidikan yang sifatnya umum, sedangkan tujuan yang sifatnya nyata dirumuskan dalam bentuk tujuan khusus.

Dalam system pendidikan nasional, tujuan umum pendidikan dijabarkan dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Makna tujuan pendidikan nasional itu adalah membentuk manusia Indonesia yang bias mandiri dalam konteks kehidupan pribadinya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta berkehidupan sebagai makhluk yang beragama (Ketuhanan Yang Maha Esa).

Manusia Indonesia yang dicita-citakan dan harus diupayakan melaluipendidikan adalah manusia yang bermoral, berilmu, berkepribadian dan beramal bagi kepentingan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara.

Kita mengenal empat jenjang tujuan pendidikan, yaitu:

- a. Tujuan umum pendidikan, yakni manusia Pancasila
- b. Tujuan institusional pendidikan (tujuan lembaga pendidikan, misalnya tujuan Sekolah Dasar, tujuan Universitas Negeri Padang)
- c. Tujuan kulikuler (tujuan standard kompetensi bidangstudi atau mata pelajaran), misalnya tujuan IPA, IPS, Bahasa, ataupun Agama
- d. Tujuan instruksional kompetensi dasar (tujuan untuk setiap kegiatan) proses belajar mengajar.

2. Pendidik

Siapakah sebenarnya pendidik itu? Pendidik ialah orang yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan.

Pendidik bertugas membimbing dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu pada tiap-tiap tahapnya.

Orang tua biasanya disebut pendidikan menurut kodrat, sedangkan guru dan tenaga-tenaga lainnya yang sejenis disebut pendidik menurut jabatan. Orang tua sebagai pendidik menurut kodrat adalah pendidik pertama dan utama. Hubungan orang tua dengan anaknya dalam hubungan edukatif mengandung dua unsure dasar, yaitu:

- a. Unsur kasih sayang orang tua terhadap anak
- b. Unsur kesadaran akan bertanggung jawab dari pendidik untuk menuntut perkembangan anak

Guru sebagai pendidik menurut jabatan menerima tanggung jawab mendidik dari tiga pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan Negara. Seyogyanyalah guru diharapkan sikap-sikap dan sifat-sifat yang normatif baik sebagai kelanjutan dari sikap orang tua pada umumnya, antara lain:

- a. Kasih sayang kepada subjek didik
- b. Tanggung jawab kepada tugas mendidik

Sehubungan dengan tanggung jawab ini Prayitno (2000) mengemukakan, "Kewajiban pendidik ialah menyelenggarakan praktek pendidikan terhadap (sejumlah) anak (peserta didik) yang menjadi tanggung jawabnya untuk memperkembangkan semua potensi yang dikaruniakan Allah SWT kepada anak secara normal."

Untuk itu pendidik dituntut harus:



- a. Menggunakan bahasa yang sopan dan mempunyai kepribadian yang kuat
- b. Disenangi dan disegani oleh peserta didik, yang berarti ia harus mempunyai kewibawaan, emosi yang stabil untuk menghadapi bermacam-macam pola peserta didik
- c. Harus bersusila, jujur, dan adil
- d. Memahami potensi anak untuk dikembangkan secara optimal
- e. Memahami kondisi anak untuk mengadakan penyesuaian program pendidikan bagi anak
- f. Bekerjasama dengan orang tua anak dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan anak seoptimal mungkin
- g. Memahami dan menjalankan dengan sebaik-baiknya segenap peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berwenang dalam menyelenggarakan pendidikan anak
- h. Mengadakan hubungan erat antara pendidik dan peserta didik di luar kelas

3. Peserta Didik

Peserta didik ialah manusia yang memiliki potensi yang selalu mengalami perkembangan sejak terciptanya sampai meninggal dunia dan perubahan-perubahan terjadi secara bertahap, tetapi secara wajar.

Prayitno (2000) berpendapat bahwa, “Hak anak ialah memperoleh pendidikan yang layak memperkembangkan segenap potensi yang dikaruniai Allah SWT kepadanya secara optimal.”

Untuk itu harus diupayakan agar anak:

- a. Memperoleh kesempatan, fasilitas, dan pelayanan pendidikan dari orang tua maupun pendidik Negara
- b. Terhindar dari pemaksaan kehendak dari orang tua atau pihak lain yang mengganggu penyelenggaraan pendidikan anak
- c. Terhindar dari hambatan yang mengterhidarhalangi penyelenggaraan pendidikan anak
- d. Terhindar dari perlakuan yang merugikan penyelenggaraan penddik
- e. Terhindar dari peraturan dan atau kebijakan yang memaksakn kehendak, menghalangi dan atau merugikan pendidikan anak

4. Materi

Berdasarkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai ditetapkan isi/materi pendidikan yang relevan dan memiliki beberapa kriteria/syarat utama yang harus dipertimbangkan, yakni:

- Bahan/materi harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan
- Bahan/materi harus sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik
- Bahan/materi harus mengandung nilai-nilai sesuai pandangan hidup bangsa
- Bahan/materi harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, menarik perhtian, minat, umur, bakat, jenis kelamin, latar belakang dan pengalaman
- Bahan/materi harus diorganisasikan menurut urutannya, sehingga dapat menuntun para pelajar secara sistematis



- Bahan/materi harus merupakan bahan wajib, sesuai dengan kurikulum
- Bahan/materi merupakan landasan untuk mempelajari bahan berikutnya
- Nilai praktis atau kegunaannya diartikan sebagai makna bahan itu bagi kehidupannya sehari-hari

5. Metode, Media dan Alat Pendidikan

a. Metode

Metode adalah cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Beberapa factor dalam menetapkan suatu metode tepat atau kurang tepat digunakan:

- Tujuan yang ingin dicapai; kalau tujuan yang ingin dicapai adalah supaya murid dapat melakukan sesuatu, dapat menggunakan metode demonstrasi, simulasi atau bermain peran.
- Factor murid. Pada kelaas yang muridnya aktif dapat menggunakan metode diskusi. Pada kelas yang umumnya muridnya pasif, metode tersebut kurang berhasil.
- Factor guru. Ada metode yang berhasil pada seorang guru namun kurang berhasil digunakan oleh guru lain.

b. Media

Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan untuk memudahkan pembelajaran dalam pendidikan.

c. Alat Pendidikan

Alat pendidikan adalah suatu upaya atau tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda/alat yang dengan sengaja digunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam proses pendidikan. Dua macam pengertian alat pendidikan, yaitu:

- Alat pendidikan yang bersifat tindakan

Yaitu berupa upaya dan siasat dalam kaitan dengan kewibawaan. Alat ini berfungsi preventif (pencegahan) mencakup teladan, anjuran, suruhan, pengarahan, dan pembinaan. Sedangkan yang berfungsi represif (reaksi setelah ada perbuatan) mencakup syarat, pujian, hadiah/ganjaran, teguran dan hukuman.

- Alat pendidikan yang berupa benda

Yaitu berupa kebendaan sebagai alat bantu yang lazim disebut sarana pengajaran seperti alat pengajaran

6. Lingkungan Pendidikan

Pengertian lingkungan pada hakekatnya merupakan sesuatu yang ada di luar diri individu, walaupun ada juga yang mengatakan bahwa ada lingkungan yang terdapat dalam diri individu.

Lingkungan dibedakan menjadi dua jenis:

a. Lingkungan Alam

Segala sesuatu yang ada di dunia ini yang berada di luar diri anak yang bukan manusia, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, iklim, air, gedung dan rumah.



b. Lingkungan Sosial

Yang termasuk lingkungan sosial adalah semua manusia yang beraada di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi diri orang tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut tempat pendidikan, lingkungan dibedakan atas:

a. Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak, karena di lingkungan itulah pertama-tama anak menerima pendidikan yang diberikan oleh orang tua.

b. Sekolah

Sekolah disebut lingkungan pendidikan yang kedua, yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan di lembaga ini adalah guru.

c. Masyarakat

Pendidikan yang diberikan biasanya tergantung kepada kebiasaan yang terjadi di lingkungan itu. Oleh sebab itu hasil pendidikannya akan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat tersebut. Alam sekitar member pengaruh tertentu kepada pendidikan anak dengan segala sifat dan kondisi tempat tinggalnya. Karena setiap masyarakat itu lingkungannya sangat bervariasi, maka pengaruh yang dihasilkannya pun berbeda terhadap proses pendidikan anak.

B. Peran Pendidikan dalam Pembentukan Karakter

Bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menyatukan berbagai suku, ras, bahasa, agama, serta etnik sosial. Ratusan tahun terserak karena penjajahan Belanda dan Jepang, kini Indonesia memiliki jati diri setelah kemerdekaan republik Indonesia.

Kebangsaan Indonesia sempat menjadi macan Asia yang paling ditakuti berbagai negara karena eksistensinya. Kini, bangsa Indonesia berada di bawah Negara-negara tetangga yang dulu banyak berguru ke Indonesia. Secara ekonomi, politik, pendidikan, serta sosial kalah jauh pertumbuhan serta perkembangannya. Inilah refleksi bagi kita semua.

Jati diri berasal dari bahasa Jawa : *Sejatining diri* yang berarti adalah siapa diri kita sesungguhnya, hakikat atau fitrah manusia, juga disebut nur Ilahi yang berisikan sifat-sifat dasar manusia yang murni dari Tuhan yang berisikan percikan-percikan sifat Ilahiah dalam batas kemampuas insani yang dibawa sejak lahir.

Dengan kata lain, orang yang berjati diri akan mampu memadukan antara cipta (olah pikir / the head), karsa (kehendak dan karya/the hand), dan rasa (olah hati/the hearth). Sementara orang Indonesia sekaang baru mampu menampilkan cipta dan karsanya, sedangkan unsur rasa belum ditampilkan padahal di dalamnya justru terdapat karkater maupun jati diri seseorang.

Keterkaitan antara jati diri, karakter, dan pemikiran serta perilaku sebagai suatu proses berawal dari jati diri yang merupakan fitrah manusia, yang mengandung sifat-sifat dasar yang diberikan oleh Tuhan dan merupakan potensi yang dapat memancar dan



ditumbuhkembangkan. Dengan demikian, tampilan-tampilan yang akan dilahirkan bergantung pada pemikiran karakter seseorang.

Jati diri bangsa tampil dalam tiga fungsi, yaitu : 1. Penanda keberadaan atau eksistensinya, 2. Pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang dan kekuatan bangsa, 3. Pembeda dengan bangsa lain di dunia.

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita terhadap diri sendiri sebagai bangsa yang harus mencerminkan rasa dan semangat kebangsaan (karakter bangsa) dan mampu mempertahankan jati dirinya sebagai bangsa, yaitu Pancasila.

Kalau wawasan kebangsaan dicanangkan oleh suatu bangsa yang belum mantap jati dirinya sebagai bangsa, wawasan kebangsaan hanya akan merupakan wacana belaka atau suatu intelektual exercise yang tentunya kurang bermanfaat.

Bangsa yang didorong oleh semangat dan karakter bangsanya akan menjadi bangsa yang maju dan jaya, sedangkan bangsa yang kehilangan karakter bangsanya akan terhapus dari muka bumi. Pendidikan yang dibangun dengan karakter bangsa akan menghasilkan lulusan yang memiliki nilai kejuangan, nasionalisme, serta ideologi bangsa yang sangat kuat. Inilah bekal penting yang harusnya ditanamkan pada setiap peserta didik agar kelak ketika berada dalam kancah persaingan global mampu menepis ideologi serta arus kekuatan bangsa lain.

Modalitas karakter kebangsaan menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi dalam system pendidikan di Indonesia. Dalam pembangunan karakter, paling tidak ada empat koridor yang

diperlukan, yaitu : (1) Internalisasi tata nilai, (2) menyadari mana yang boleh dan mana yang tidak boleh (The does and the don'ts), (3) membentuk kebiasaan (habit forming), dan (4) menjadi Teladan (Role model) sebagai pribadi karakter.

Apabila kita melihat pembangunan karakter yang merupakan proses tiada henti, maka dalam kehidupan kita dapat dibagi empat tahapan pembangunan karakter, yaitu : (1) pada usia dini, kita sebut sebagai tahap pembentukan, (2) pada usia remaja, kita sebut tahap pengembangan, (3) pada usia dewasa, kita sebut tahap pematangan, dan (4) pada usia tua, kita sebut tahap pembijaksanaan. Kuat atau lemahnya ketahanan pribadi akan menghasilkan kuat atau lemahnya ketahanan keluarga dan sebaliknya.

Dalam mewujudkan hasrat untuk berubah tentunya kita harus mulai dari diri kita sendiri, kita harus menemukenali diri sendiri sebagai cara terbaik untuk intropeksi, lalu membangun jati diri melalui membangun karakter.

Generasi muda Indonesia tidak boleh lengah dengan arus global yang akan mereduksi nilai budaya, ideologi, nilai social, bahkan adat istiadat bangsa Indonesia.

Pendidikan Indonesia perlu menyiapkan generasi muda Indonesia yang tangguh serta memiliki daya saing kuat dengan generasi muda bangsa lain. Pemuda memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, modalitas yang cukup, serta memiliki komitmen nasionalisme yang kokoh.

Jika suatu bangsa tidak mempunyai ciri khas atau cirikhasnya telah pudar kerana suatu hal, bangsa tersebut akan mengalami perubahan sikap dan tatanan kehidupan yang terjadi pada masyarakatnya. Mereka akan cenderung meniru perilaku atau cirikhas bangsa lain yang diidolakannya.

Padahal ciri khas bangsa lain belum tentu cocok dan sesuai bila digunakan pada bangsa tersebut. Ketidak cocokan tersebut mungkin dikarenakan karena faktor letak geografis, kebudayaan, agama yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, sejarah pembentukan bangsa, dan sebagainya.

Dampak dari hilangnya identitas suatu bangsa dan pola perilaku masyarakat yang baru tersebut tidak sesuai dengan keadaan bangsa itu, maka akan melemahkan keadaan bangsa tersebut dalam berbagai bidang. Sehingga dapat dengan mudah bangsa itu dihancurkan atau dijajah oleh negara lain. jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya tercermin pada perilaku masyarakat Indonesia pada umumnya yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam pancasila.

Berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial, peraturan/hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip HAM, telah teridentifikasi 80 butir nilai karakter yang dikelompokkan menjadi lima, yaitu nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan (1) Tuhan Yang Maha Esa, (2) diri sendiri, (3) sesama manusia, dan (4) lingkungan, serta (5) kebangsaan. Namun demikian, penanaman kedelapanpuluh nilai tersebut merupakan hal yang sangat sulit.

Berikut adalah daftar 20 nilai utama yang dimaksud dan diskripsi ringkasnya.

1. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan (Religius). Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan/atau ajaran agamanya.
2. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri.
3. Jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak lain.
4. Bertanggungjawab. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan YME.
5. Bergaya Hidup Sehat. Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan.
6. Disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
7. Kerja keras. Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas (belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya.



8. Percaya Diri. Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya.
9. Berjiwa Wirausaha. Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.
10. Berpikir Logis, Kritis, Kreatif, dan Inovatif. Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki.
11. Mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
12. Rasa ingin tahu. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
13. Cinta Ilmu. Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan.
 - a. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama
 - 1) Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri serta orang lain.

- 2) Patuh pada aturan-aturan sosial. Sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum.
 - 3) Menghargai karya dan prestasi orang lain. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.
 - 4) Santun. Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke semua orang.
 - 5) Demokratis. Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
- b. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
- c. Nilai Kebangsaan. Cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
- 1) Nasionalis. Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya.



- 2) Menghargai keberagaman. Sikap memberikan respek/hormat terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, dan agama.

C. Pembelajaran dan Kepribadian

Belajar akan lebih berhasil bila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa (S. Nasution, 2005:23). Belajar akan lebih berhasil manakala muncul dari hati sanubari individu. Belajar yang didorong oleh kamauan secara internal akan lebih memberikan hasil daripada karena dorongan dari luar. Belajar karena kesadaran sangat membantu untuk mencerna materi pembelajaran.

Begitu pentingya motivasi internal untuk menumbuhkan minat belajar, guru dituntut untuk bisa berperan sebagai motivator terhadap peserta didiknya. Guru perlu memberikan motivasi agar peserta didik bisa menumbuhkan semangat belajar dari dalam diri masing-masing.

Bentuk pemberian motivasi kepada peserta didik bisa berupa harapan masa depan jika siswa bisa menguasai suatu ilmu atau pengetahuan. Katakanlah jika anak menguasai penggunaan busur derajat dengan baik, maka kalau kelak menjadi pilot akan mudah mengendalikan pesawat terbang. Karena pesawat terbang diterbangkan dengan menggunakan prinsip kerja busur derajat. Aplikasi penggunaan busur derajat dalam kehidupan nyata bisa menumbuhkan semangat siswa untuk belajar matematika dengan sungguh-sungguh.

Begitupun halnya dalam pelajaran lainnya. Bagaimana guru bisa mengkaitkan suatu ilmu dengan kehidupan nyata. Ilmu yang dipelajari bukan sekedar pengetahuan teoritis, namun bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Ilmu yang dipelajari hendaklah membawa manfaat dalam kehidupan nyata. Pembelajaran yang menarik menuntut kepiawian guru dalam menggunakan media, model, dan strategi pembelajaran bervariasi. Pembelajaran dengan menggunakan media, model, dan strategi yang bervariasi menjadikan suasana kelas lebih hidup. Siswa menjadi lebih bergairah mengikuti pembelajaran.

Guru sebagai motivator dalam pembelajaran perlu memahami kondisi kejiwaan peserta didik. Guru yang memahami kondisi kejiwaan peserta didik akan memberikan perlakuan sesuai dengan keutuhan siswa.

Memperhatikan emosi siswa dapat membantu guru mempercepat pembelajaran siswa. Memahami emosi siswa dapat membuat pembelajaran lebih bermakna dan permanen. Penelitian otak semakin menunjukkan adanya hubungan antara keterlibatan emosi, memori jangka panjang, dan belajar (Bobbi DePorter, Mark Reardon, dan Sarah Singer-Nourie, 2001:22).

Sangat sedikit pembelajaran terjadi ketika siswa tertekan, dikecewakan, atau berada dalam kondisi terganggu lainnya. Akan tetapi, ketika mereka didorong kepada kondisi pembelajaran yang positif, mereka secara alamiah akan menjadi lebih baik (Eric Jensen, 2008:201). Keberhasilan dalam pembelajaran dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan dan emosi yang melingkupi. Suasana batin yang riang sangat mendukung keberhasilan pembelajaran. Seseorang sulit

untuk belajar dengan baik ketika berada dalam tekanan dan keterpaksaan.

Agar pemebelajaran berhasil dengan baik perlu diciptakan suasana yang kondusif. Suasana ruangan yang nyaman, penerangan yang memadai, pengendalian suara secara ritmis, dan alunan musik instrumental yang lembut akan membantu keberhasilan pembelajaran. Ruangan belajar hendaklah diseting sedemikian rupa. Ruangan belajar yang baik hendaklah memberikan keleluasaan siswa untuk bergerak secara leluasa. Pencahayaan hendaklah dibuat senyaman mungkin, tidak terlalu gelap dan juga tidak erlalu silau. Jika memungkinkan diruangan belajar ada sosund system yang bisa menghantarkan alunan music instrumental yang lembut yang merangsang otak untuk berektifitas secara optima.

Meski melalui proses belajar yang sama, hasil belajar yang dicapai seseorang tidak bisa sama. Sebab proses belajar dipengaruhi berbagai faktor yang bisa menyebabkan pencapaian hasil belajar menjadi beragam.

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. Faktor dari dalam diri siswa terutama menyangkut kemampuan yang dimiliki siswa. Faktor ini besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar yang akan dicapai.

Clark dalam Angkowo dan Kosasih (2007: 50) mengungkapkan bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. Ini

menunjukkan faktor internal pada diri siswa lebih dominan dalam mempengaruhi hasil belajar.

Berkaitan dengan faktor dari dalam diri siswa, selain faktor kemampuan, ada juga faktor lain yaitu motivasi, minat, perhatian, sikap, kebiasaan belajar, ketekunan, kondisi sosial ekonomi, kondisi fisik dan psikis. Salah satu faktor lingkungan yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar adalah kualitas pengajaran.

Teori belajar di sekolah (Theory of School Learning) dari Bloom, menunjukkan ada tiga variabel utama dalam teori belajar di sekolah, yaitu karakteristik individu, kualitas pengajaran, dan hasil belajar siswa. (Angkowo, 2007: 51).

Faktor kualitas pengajaran, khususnya kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa telah ditunjukkan oleh hasil penelitian. Salah satu di antaranya penelitian Nana Sudjana (1984) di bidang Pendidikan Kependudukan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 76,6% hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kompetensi guru, dengan rincian kemampuan guru mengajar memberikan sumbangan 32,43%, penguasaan materi pelajaran memberikan sumbangan 32,58% dan sikap guru terhadap mata pelajaran memberikan sumbangan 8,60%.

Di samping faktor guru, kualitas pengajaran dipengaruhi juga oleh karakteristik kelas. Variabel karakteristik kelas (Sabri, 2005: 50) antara lain:

- a. Besarnya (*class size*). Artinya, banyak sedikitnya jumlah siswa yang belajar. Ukuran yang biasa digunakan ialah ratio 1 : 40, artinya satu orang guru melayani 40 siswa. Diduga makin besar



jumlah siswa yang harus dilayani guru dalam satu kelas makin rendah kualitas pengajaran, demikian pula sebaliknya. Secara logika atau akal sehat, tidak mungkin guru dapat mengembangkan kegiatan belajar yang efektif dalam situasi kelas yang memiliki jumlah siswa yang banyak.

- b. Suasana belajar. Suasana belajar yang demokratis akan memberi peluang mencapai hasil belajar yang optimal, dibandingkan dengan suasana yang kaku, disiplin yang ketat dengan otoritas ada pada guru. Dalam suasana belajar demokratis, ada kebiasaan siswa belajar, mengajukan pendapat, berdialog dengan teman sekelas dan lain-lain. Perasaan yang cemas dan khawatir pada siswa sering tidak menumbuhkan kekreatifan belajar siswa.
- c. Fasilitas dan sumber belajar yang tersedia. Sering kita temukan bahwa guru merupakan satu-satunya sumber belajar di kelas. Situasi ini kurang menunjang kualitas pengajaran, sehingga hasil belajar yang dicapai siswa tidak optimal. Kelas semestinya diusahakan sebagai laboratorium belajar bagi siswa. Artinya kelas mesti menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku pelajaran, alat peraga, dan lain-lain. Di samping itu mesti diusahakan agar siswa diberi kesempatan untuk berperan sebagai sumber belajar.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas pengajaran di sekolah adalah karakteristik sekolah itu sendiri. Karakteristik sekolah berkaitan dengan disiplin sekolah, perpustakaan yang ada di sekolah, letak geografis sekolah, lingkungan sekolah, etika dalam

arti sekolah memberikan perasaan nyaman, kepuasan belajar, bersih, rapi, dan teratur.

Ada tiga unsur dalam kualitas pengajaran yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, yakni: kompetensi guru, karakteristik kelas, dan karakteristik sekolah (Sabri, 2005: 51).

Selain faktor dari dalam diri dan faktor lingkungan, ada faktor lain yang turut menentukan hasil belajar siswa yaitu faktor pendekatan belajar (*approach to learning*). Ini berkaitan dengan upaya belajar yang dilakukan siswa yang meliputi strategi dan metode pembelajaran. Ketiga faktor ini dalam banyak hal saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain.

Caroll dalam Angkowo dan Kosasih (2007: 51) berpendapat bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yakni:

- a. faktor bakat belajar;
- b. faktor waktu yang tersedia untuk belajar;
- c. faktor kemampuan individu;
- d. faktor kualitas pengajaran; dan
- e. faktor lingkungan.

Dari kelima faktor tersebut, faktor pertama sampai faktor keempat berkenaan dengan kemampuan individu, sedangkan faktor terakhir merupakan faktor yang datangnya dari luar diri siswa yaitu faktor lingkungan.

Pengaruh faktor lingkungan terhadap hasil belajar juga disampaikan oleh peneliti, Croxford dan Cowie, dalam John



MacBeath dan Peter Mortimore (2005: 23) yang menyimpulkan bahwa :

Efek dari konteks sosial sekolah tidak sama untuk semua murid. Suatu sekolah dengan konteks sosial tinggi punya efek yang besar dalam memperbaiki hasil belajar murid yang latar belakang keluarganya sendiri relatif tidak menguntungkan, dibandingkan hasil belajar seorang murid yang latar belakang keluarganya sendiri menguntungkan. Sebaliknya, suatu sekolah dengan konteks sosial rendah punya efek lebih menekan pada hasil belajar seorang murid yang latar belakang keluarganya sendiri secara relatif tidak menguntungkan.

Muhibbin Syah (2004: 144) membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa menjadi tiga macam, yakni :

- a. Faktor *Internal* (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa yang meliputi: aspek fisiologis seperti keadaan mata dan telinga, dan aspek psikologis seperti intelegensi;
- b. Faktor *eksternal* (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa yang meliputi: lingkungan sosial, lingkungan nonsosial (rumah, gedung sekolah, dan sebagainya); dan
- c. Faktor *pendekatan belajar* (*approach to learning*), yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran.

Menurut Yamin (2007: 141), faktor-faktor yang mempengaruhi belajar diantaranya :

a. Bakat dan kecepatan belajar

Masing-masing siswa dan mahasiswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda dalam mempelajari suatu pelajaran, dan kecepatan belajar setiap siswa dan mahasiswa berbeda dalam mempelajari pelajaran yang berbeda.

b. Kemampuan untuk menguasai pelajaran

Setiap mata pelajaran, tergantung dari mode pembelajaran (*Instructional mode*) yang digunakan dalam mata pelajaran tersebut, mempersyaratkan kemampuan atau keterampilan siswa dan mahasiswa yang berbeda (*verbal ability, aural ability, dll.*).

c. Mutu program pembelajaran

Mutu program pembelajaran harus memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

- Kejelasan dan ketepatan teknik pembelajaran untuk setiap siswa dan mahasiswa (berdasarkan perbedaan individu).
- Jumlah partisipasi dan latihan dalam belajar untuk setiap mahasiswa.
- Jumlah dan jenis penguatan serta umpan balik yang diberikan untuk setiap siswa dan mahasiswa.

d. Ketahanan (*perseverance*)

Setiap siswa dan mahasiswa berbeda dalam ketahanan atau keuletannya (*persistence*) dalam mempelajari suatu mata pelajaran



berdasarkan pengalaman keberhasilannya dan kegagalannya dalam mempelajari mata pelajaran tersebut.

e. Waktu

Setiap siswa dan mahasiswa membutuhkan jumlah waktu yang berbeda untuk mempelajari dan menguasai satu mata pelajaran.

BAB II

BUDAYA PENDIDIKAN INDONESIA

A. Konsep *Life Skill Education*

Ada empat 4 tantangan besar pendidikan nasional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, yaitu peningkatan: (1) kualitas (2) pemerataan kesempatan, (3) relevansi, dan (4) efisiensi. Oleh sebab itu tuntutan adanya pendidikan kecakapan hidup (*life skill education*) pada semua jenis dan jenjang pendidikan pada dasarnya didorong oleh asumsi bahwa relevansi antara pendidikan dengan kebutuhan hidup tidak seimbang.

Adanya tirai antara keduanya dianggap lebar, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Pendidikan makin terisolasi dari kebutuhan hidup sehingga, hal ini terbukti dari fakta sejarah dan kenyataan saat ini banyak tamatan pendidikan dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan kurang siap menghadapi kebutuhan hidup dalam kehidupan nyata. Suatu pendidikan dikatakan relevan dengan kebutuhan hidup apabila pendidikan tersebut sesuai dengan kebutuhan hidup. Namun, pertanyaannya adalah kebutuhan hidup yang mana? Sementara itu, kebutuhan hidup sangat luas dimensi dan ragamnya, misalnya ada kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan bangsa. Kalau



mengacu pada Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1998 dan Undang-Undang No.2, Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), kebutuhan hidup itu menyangkut kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan pembangunan yang meliputi berbagai sektor dan subsector (pertanian, industri, jasa, dsb.).

Kebutuhan kebutuhan di atas (disebut juga kepentingan) tidak selamanya sejalan satu sama lain, sehingga terjadi apa yang dikenal dengan perbedaan kepentingan antara berbagai kebutuhan hidup terhadap pendidikan. Idealnya, pendidikan harus relevan dengan berbagai kebutuhan hidup itu. Namun, pada akhirnya perlu diambil keputusan mengenai manakah diantara kebutuhan atau keperluan yang akan menjadi prioritas utama pada suatu kurun waktu tertentu. Dalam kerangka empat strategi dasar kebijakan pendidikan, maka pendidikan kecakapan hidup merupakan salah satu alternatif, yaitu meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan hidup.

Pendidikan sekolah (PS) dan pendidikan luar sekolah (PLS) diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas daya pikir, daya kalbu dan daya fisik peserta didik sehingga yang bersangkutan memiliki lebih banyak pilihan dalam kehidupan, baik pilihan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, pilihan kesempatan untuk bekerja maupun pilihan untuk mengembangkan dirinya. Untuk menecapai tujuan tersebut, PS dan PLS perlu memberikan bekal dasar kemampuan kesanggupan dan skill kepada peserta didik agar mereka siap menghadapi berbagai kebutuhan hidup. Telah banyak upaya yang dilakukan dalam memberikan bekal dasar

kecakapan hidup, baik melalui pendidikan di keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat.

Upaya-upaya tersebut bukan tidak berhasil sama sekali dalam meningkatkan kemampuan, kesanggupan dan keterampilan hidup tamatannya, akan tetapi kebutuhan hidup yang memiliki ciri “berubah” telah menuntut PS dan PLS untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian PS dan PLS dituntut menghasilkan tamatannya yang mampu, sanggup, dan terampil untuk menghadapi tantangan hidup yang sarat kompetisi dan kolaborasi sekaligus. Mampu dalam arti tamatan PS dan PLS memiliki kualifikasi yang dibutuhkan bagi kehidupan masa depan. Sanggup dalam arti tamatan PS dan PLS mau, komit, bertanggung jawab dan berdedikasi menjalankan kehidupannya. Terampil dalam arti cepat, cekat, dan tepat dalam mencapai sasaran hidup yang diinginkannya.

Mengingat peserta didik PS dan PLS berada dalam kehidupan nyata maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mendekatkan pendidikan (kegiatan belajar mengajar) dengan kebutuhan hidup yang memiliki nilai-nilai preservative dan progresif sekaligus melalui pengintensifan dan pengefektifan pendidikan kecakapan hidup. Istilah pengintensifan dan pengefektifan perlu digaris bawahi agar tidak salah persepsi bahwa selama ini tidak diajarkan kecakapan hidup sama sekali dan yang diajarkan adalah kecakapan untuk mati. Kecakapan hidup sudah diajarkan, akan tetapi perlu peningkatan intensitas dan efektifitasnya, sehingga PS dan PLS dapat menghasilkan tamatan yang mampu, sanggup, dan terampil terjun dalam kebutuhan hidup nantinya.



UUSPN telah mengamantkan pendidikan kecakapan hidup, yang bunyinya: “*Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan*”. Jadi, pendidikan kecakapan hidup bukanlah sesuatu yang baru dan karenanya juga bukan topik yang orisinal. Yang benar-benar baru adalah bahwa kita mulai sadar dan berpikir bahwa relevansi antara pendidikan dengan kebutuhan hidup perlu ditingkatkan intensitas dan efektivitasnya.

Meskipun kecakapan hidup telah didefinisikan berbeda-beda, namun esensi pengertiannya sama. Malik Fajar (2002) mendefinisikan kecakapan hidup sebagai kecakapan untuk bekerja selain kecakapan untuk berorientasi ke jalur akademik. Sementara itu *Tim Broad-Based Education* (2002) menafsirkan kecakapan hidup sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya.

Meskipun terdapat perbedaan dalam pengertian kecakapan hidup, namun esensinya sama yaitu bahwa kecakapan hidup adalah kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan nikmat dan bahagia. Oleh karena itu, pendidikan kecakapan hidup adalah,

pendidikan yang member bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada peserta didik tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjalankan kehidupannya, yaitu dapat menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya.

Dengan definisi tersebut, maka pendidikan kecakapan hidup harus merefleksikan nilai-nilai kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang bersifat preservative maupun progresif. Pendidikan perlu diupayakan relevansinya dengan nilai-nilai kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan cara ini, pendidikan akan lebih realistis, lebih kontekstual. Tidak akan mencabut peserta didik dari akarnya, sehingga pendidikan akan lebih bermakna bagi peserta didik dan akan tumbuh subur. Seseorang dikatakan memiliki kecakapan hidup apabila yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjalankan kehidupan dengan nikmat dan bahagia. Kehidupan yang dimaksud meliputi kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan tetangga, kehidupan perusahaan, kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa, dan kehidupan-kehidupan lainnya. Ciri kehidupan adalah perubahan dan perubahan selalu menuntut kecakapan-kecakapan untuk menghadapinya.

Tujuan pendidikan kecakapan hidup sangat bervariasi sesuai kepentingan yang akan dipenuhi. Tim Broad-Based Education Depdiknas (2002) mengemukakan bahwa ada tiga tujuan pendidikan kecakapan hidup untuk:

1. Mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi,



2. Memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis luas, dan
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lingkungan sekolah, dengan member peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat, sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

Naval Air Station Antlanta (2002) memaparkan bahwa tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah: *to promote family strength and growth through education; to teach concepts and principles relevant to family living, to explore personal attitudes and values, and help members understand and accept the attitudes and values of others; to develop interpersonal skills which contribute to family well-being; to reduce marriage and family conflict and thereby enhance service member productivity; and to encourage on-base delivery of family education program and referral as appropriate to community programs.*"i appropriate to community programs. Sementara itu,

Meskipun bervariasi dalam menyatakan tujuan pendidikan kecakapan hidup, namun konvergensinya cukup jelas yaitu bahwa tujuan utama pendidikan kecakapan hidup adalah menyiapkan peserta didik agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya di masa datang. Esensi dari pendidikan kecakapan hidup adalah untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan nilai-nilai kebutuhan hidup, baik preservatif maupun progresif. Lebih spesifiknya, tujuan pendidikan kecakapan hidup dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Memberdayakan aset kualitas batiniah, sikap, dan perbuatan lahiriyah peserta didik melalui pengenalan (logos), penghayatan (etos), dan pengamalan (patos) nilai-nilai kehidupan sehari-hari sehingga dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya.
2. Memberikan wawasan yang luas tentang pengembangan karir, yang dimulai dari pengenalan diri, eksplorasi karir; orientasi karir, dan penyiapan karir.
3. Memberikan bekal dasar dan latihan-latihan yang dilakukan secara benar mengenai nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang dapat memampukan peserta didik untuk berfungsi menghadapi kehidupan masa depan yang sarat kompetisi dan kolaborasi sekaligus
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sekolah melalui pendekatan manajemen berbasis sekolah dengan mendorong peningkatan kemandirian sekolah, partisipasi stakeholders, dan fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah.

Memfasiliasi peserta didik dalam memecahkan permasalahan kehidupan yang dihadapi sehari-hari, misalnya kesehatan mental dan fisik, kemiskinan, kriminal, pengangguran, lingkungan sosial dan fisik, narkoba, kekerasan, dan kemajuan iptek.



B. Pendidikan Kecakapan Hidup dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Nasional

Sekian banyak tujuan dan manfaat Pendidikan kecakapan hidup, namun yang harus menjadi tujuan utama pendidikan kecakapan hidup adalah untuk mencapai hal yang lebih luas yaitu Tujuan pendidikan Nasional. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sangat diperlukan upaya-upaya yang dapat menjembatani antara siswa dengan kebutuhan hidup.

Kurikulum 2013 revisi yang diterapkan dewasa ini memang merupakan salah satu upaya untuk menjembatannya, namun perlu ditingkatkan kedekatannya dengan nilai-nilai kebutuhan hidup. Bila demikian, pertanyaannya adalah: “Apakah kurikulum 2013 revisi yang ada sekarang sudah merefleksikan kebutuhan hidup saat ini? Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan kajian yang mendalam terhadap kurikulum 2013 revisi yang ada dan terhadap nilai-nilai kehidupan saat ini. Kesenjangan antara keduanya (kurikulum 2013 revisi dan kebutuhan hidup) merupakan tambahan pengayaan yang perlu diintegrasikan terhadap kurikulum 2013 revisi yang ada sehingga kurikulum 2013 revisi yang ada saat ini benar-benar merefleksikan nilai-nilai kebutuhan hidup.

Implementasi pendidikan kecakapan hidup terhadap peserta didik bukanlah untuk mengganti kurikulum 2013 revisi yang ada, akan tetapi untuk reorientasi terhadap kurikulum 2013 revisi yang ada sekarang agar benar-benar merefleksikan nilai-nilai kebutuhan hidup. Jadi, pendidikan kecakapan hidup merupakan upaya untuk menjembatani kesenjangan antara kurikulum 2013 revisi yang ada

dengan tuntutan kebutuhan hidup saat ini, juga bukan untuk merombaknya.

Penyesuaian-penyesuaian kurikulum 2013 revisiterhadap tuntutan kehidupan perlu dilakukan mengingat kurikulum 2013 revisi yang ada memang dirancang berorientasi pada mata pelajaran yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan hidup yang umumnya bersifat utuh. Selain itu, kehidupan memiliki karakteristik untuk berubah, sehingga sudah sewajarnya jika kurikulum 2013 revisi yang ada perlu didekatkan dengan kebutuhan hidup. Dalam pandangan ini, maka kurikulum 2013 revisi merupakan sasaran yang bergerak dan bukan sasaran yang diam.

Dalam arti yang sesungguhnya, pendidikan kecakapan hidup memerlukan penyesuaian-penyesuaian dari pendekatan *supply-driven* menuju ke *demand-driven*. Pada pendekatan *supply-driven*, apa yang diajarkan cenderung menekankan pada *school-based learning* yang belum tentu sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai kebutuhan hidup yang dihadapi oleh peserla didik. ‘

Namun pada pendekatan *demand-driven*, apa yang diajarkan kepada peserta didik merupakan refleksi nilai-nilai kebutuhan hidup yang dihadapinya sehingga lebih berorientasi kepada *life skill-based learning*. Artinya pendidikan kecakapan hidup sangat identik dengan *demand-driven*.

Dengan demikian, kerangka pengembangan pendidikan berbasis kecakapan hidup idealnya ditempuh secara berurutan sebagai berikut:



- Diidentifikasi masukan dari hasil penelitian, pilihan-pilihan nilai, dan dugaan para ahli tentang nilai-nilai kebutuhan hidup yang berlaku. Hal ini tersebut kemudian digunakan sebagai bahan, untuk mengembangkan kompetensi kecakapan hidup. Kompetensi kecakapan hidup yang dimaksud harus menunjukkan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya dalam dunia yang sarat perubahan.
- Kurikulum 2013 revisi dikembangkan berdasarkan kompetensi kecakapan hidup yang telah dirumuskan. Artinya, apa yang harus, seharusnya, dan yang mungkin diajarkan pada peserta didik disusun berdasarkan kompetensi yang telah dikembangkan.
- Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup perlu dilaksanakan dengan tepat agar kurikulum 2013 revisi berbasis kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara cermat. Hal-hal yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup seperti misalnya tenaga kependidikan (guru), pendekatan-strategi-metode pembelajaran, media pendidikan, fasilitas, tempat belajar dan durasi belajar, harus siap.
- Evaluasi pendidikan kecakapan hidup perlu dibuat berdasarkan kompetensi kecakapan hidup yang telah dirumuskan pada langkah kedua. Karena evaluasi belajar disusun berdasarkan kompetensi, maka penilaian terhadap prestasi belajar peserta didik tidak hanya dengan *pencil and*

paper test, melainkan juga dengan performance test dan bahkan dengan evaluasi otentik.

Pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah di masa depan akan menekankan pada kecakapan hidup. Diharapkan, tujuan pendidikan nasional lebih menekankan pada penguasaan kehidupan, kurikulum 2013 revisi lebih merefleksikan kebutuhan hidup, penyelenggaraannya benar-benar tepat dalam merealisasikan kurikulum 2013 revisi berbasis kecakapan hidup yang ditunjukkan oleh guru memiliki penguasaan kehidupan yang kuat, siswa mempelajari kenyataan dan aktif, metode pembelajaran lebih konkrit, kerja tim kuat, media pendidikan menggunakan kenyataan, tempat belajar tidak harus selalu dikelas tetapi juga di kancha/kehidupan, durasi pembelajaran tergantung kompetensi yang ingin dikuasai, referensi tidak selalu berupa buku tetapi juga kebutuhan hidup/konteks, pengalaman hidup akan lebih kaya, dan evaluasi belajar lebih menekankan pada autentik.

C. Ragam Jenis Pendidikan Kecakapan Hidup

Bukan sebuah kenyiscayaan bahwa kehidupan sangat identik dengan perubahan. Tamatan Pendidikan Sekolah dan Pendidikan Luar Sekolah akan menjalani kehidupan, yang berarti mereka harus mampu dan sanggup menghadapi perubahan dan bahkan mampu dan sanggup menjadi *agent of change*. Perubahan ada yang tidak diinginkan dan ada yang diinginkan. Perubahan, yang tidak diinginkan akan mengusik kelangsungan hidup manusia, dan perubahan yang diinginkan akan mendukung perkembangan



manusia. Agar tamatan PS dan PLS mampu, sanggup, dan terampil menjalani kehidupan, mereka harus diberi bekal kecakapan hidup.

Menurut US Department of Labor (1992), peserta didik harus diberi bekal kecakapan hidup yang terdiri dari lima kompetensi (kemampuan mengelola sumber daya, kemampuan inter personal, kemampuan mencari dan menggunakan informasi, kemampuan menggunakan sistem, dan kemampuan menggunakan teknologi dalam kehidupan) dan tiga bagian kemampuan elementer (kecakapan elementer dalam baca, tulis, hitung, bicara, mendengar; kecakapan berfikir; dan kualias personal). Kemudian, the National Training Board (1992) dari Australia mengharuskan agar setiap generasi mudanya memiliki tujuh kompetensi kunci sebagai berikut: *collecting, analysing and organising information; communicating ideas and information; planning and organising activities, working with others and in team; using mathematical ideas and techniques; solving problems; and using technology*. Sementara itu,

Slamet PH (1997) mengemukakan bahwa kecakapan hidup dapat dikategorikan menurut kualias fisik, akal, kalbu, dan spiritual:

1. Kecakapan fisik dapat diukur dari derajat keterampilan,
2. Kecakapan akal dapat diukur dari kecerdasan dan variasi daya pikirnya (deduktif, induktif, ilmiah, nalar, rasional, kritis, kreatif, lateral, discovery, exploratory, dan sistem),
3. Kecakapan kalbu dapat diukur dari daya rasanya dan daya emosinya (rasa kasih saying, kesopanan, toleransi, kejujuran, disiplin diri, komitmen, dan integrias, dan

4. Kecakapan spiritual ditunjukkan oleh derajat keimanan dan ketaqwaan terhadap TuhanYang Maha Esa.

United Kingdom melalui General National Vocational Qualification (1993) mengharuskan bahwa setiap penduduknya harus memiliki core skills sebagai berikut:

Communication, personal skills, problem solving, information technology, and modern language. New Zealand (1994) juga menghendaki semua generasi muda memiliki *essential skills* sebagai berikut: *information skills, communication skills, self-management skills, work and study skills, numeracy skills, problem solving and decision-making skills.*

Tim Broad-Based Education Depdiknas (2002) merumuskan kecakapan hidup menjadi lima, yaitu:

1. Kecakapan personal,
2. Kecakapan berfikir rasional,
3. Kecakapan sosial,
4. Kecakapan akademik, dan
5. Kecakapan kejuruan.

Kecakapan personal terlalu sempit definisinya karena hanya difokuskan pada pengenalan diri (self awareness). Padahal kecakapan personal sangat luas dimensinya. Demikian juga, kecakapan berpikir juga hanya disempitkan pada berpikir rasional, padahal kecakapan berpikir juga sangat luas dimensinya, misalnya kecakapan berpikir deduktif induktif, ilmiah, kritis, kreatif, nalar/logik, lateral, discovery, exploratory, dan sistem. Kemudian



makna kecakapan akademik juga rancu karena yang dimaksud kecakapan akademik (oleh Tim Broad-Based Education) adalah kecakapan berpikir ilmiah. Tidak jelas perbedaan antara kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*) dan kecakapan berpikir akademik.

Wacana-wacana tersebut di atas mendorong penulis untuk merumuskan kecakapan hidup menjadi dua kategori, yaitu kecakapan hidup yang bersifat dasar dan instrumental.

Kecakapan hidup yang bersifat dasar adalah kecakapan yang bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman, tidak tergantung pada perubahan waktu dan ruang, dan merupakan fondasi dan sokoguru bagi tamatan PS dan PLS agar bisa mengembangkan kecakapan hidup yang bersifat instrumental.

Kecakapan hidup yang bersifat instrumental adalah kecakapan yang bersifat relatif kondisional, dan dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan ruang, waktu, situasi, dan harus diperbaharui secara terus menerus sesuai dengan derap perubahan. Mengingat perubahan kehidupan berlangsung secara terus menerus, maka diperlukan kecakapan-kecakapan yang mutakhir, adaptif dan antisipatif. Oleh karena itu, prinsip belajar sekali selesai dan tidak perlu belajar lagi. tidak relevan lagi. Tamatan PS dan PLS, selain harus belajar sesuatu yang baru (*learning*), harus juga mampu melupakan pengalaman belajar yang lalu yang tidak lagi relevan lagi dengan kehidupan saat ini (*unlearning*) dan selalu belajar kembali (*relearning*). Adapun kategori dimensi kecakapan hidup yang bersifat dasar dan instrumental yang dimaksud dapat dirinci sebagai berikut.

BAB III

PENDIDIKAN INKLUSIF

A. Resolusi Pendidikan

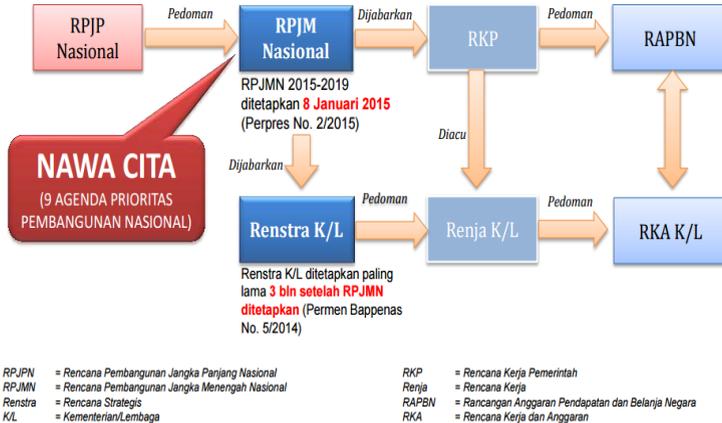
Dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) periode 2005-2025, ditegaskan visi pembangunan nasional adalah “mewujudkan manusia dan masyarakat yang mandiri, maju, adil dan makmur”. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rancangan agar pembangunan di setiap sektor dapat tercapai secara optimal dan mampu mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. RPJPN perlu dilakukan agar menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional.

Kemudian, Presiden terpilih yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya (Undang-Undang No.17 tahun 2007). RPJPN harus menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah (RPJPD) yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan



nasional dan pembangunan daerah bisa sinergis dalam mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam hal ini mempunyai wewenang untuk mengevaluasi dan pengendalian terhadap RPJP

Berikut gambar alur RPJPN



Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut: *Pertama*, terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Tercapainya sasaran ini bisa ditandai dengan terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi IPTEK. *Kedua*, terwujudnya bangsa yang berdaya saing

untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Hal ini bisa ditunjukkan oleh beberapa hal, antara lain: tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.

Kemudian, meningkatnya kualitas SDM, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang. Terakhir, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas. (www.tataruangindonesia.com)

Dalam draft RPJPN 2005-2025 juga menetapkan 8 misi pembangunan nasional yaitu 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah pancasila; 2) Bangsa yang berdaya saing; 3) Masyarakat demokratis yang berlandaskan supremasi hukum; 4) Indonesia yang damai, aman dan bersatu; 5) Pemerataan pembangunan yang berkeadilan; 6) Indonesia asri dan lestari; 7) Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan



kepentingan nasional; dan 8) Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan dunia Internasional.

Pembangunan pendidikan nasional adalah upaya yang sengaja dirancang untuk memperkuat tiga komponen secara sistematis, bertahap dan berkesinambungan. Ketiga komponen tersebut dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:

No	Komponen	Fungsi dasar pendidikan	Jenis investasi
1	Pendidikan dasar untuk semua (<i>education for all</i>)	Pelayanan pendidikan dasar bagi semua orang yang berfungsi membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab	Investasi publik (investment public)
2	Pendidikan persiapan kerja (<i>education for most people</i>)	Pelayanan pendidikan bagi sebagian besar orang yang berfungsi untuk menyiapkan mereka untuk bekerja secara produktif dan berusaha secara mandiri	Investasi perorangan dan publik (private and Public Investment)
3	Pendidikan tinggi dan riset (<i>education for the elite</i>)	Pelayanan pendidikan bagi sebagian kecil orang yang berfungsi untuk menyiapkan	Investasi perorangan (private and public

		penguasaan, pengembangan, pendayagunaan pengetahuan teknologi.	dan ilmu dan	investment)
--	--	--	--------------------	-------------

Dalam kerangka pembangunan jangka panjang 2005-2025, ditetapkan empat tahapan pokok pembangunan nasional jangka menengah lima tahunan (Presentasi Deputy Ketua Bappenas; 2009) yaitu; tahap *pertama* (2005-2009); menata kembali negara kesatuan Republik Indonesia, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik, tahap *kedua* (2010-2014) memantapkan penataan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), membangun kemampuan IPTEK, dan memperkuat daya saing perekonomian.

Tahap *ketiga* (2015-2020) memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam (SDA) yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK; dan tahap *keempat* (2020-2024) mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Tahapan pembangunan nasional tahun 2015-2020 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan



menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK. Dalam kerangka ini yang menjadi hal pokok adalah pembangunan SDM yang berkualitas, serta penggunaan IPTEK. Oleh sebab itu, arah kebijakan nasional dalam tahapan ini harus secara konsisten dijabarkan ke dalam kebijakan nasional setiap sektor pembangunan.

Hal yang mesti kita yakini adalah, manusia adalah motor penggerak dari setiap pembangunan yang ada di negeri ini. Pengembangan SDM menjadi penting dalam rangka mencapai target dari RPJPN 2025. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan nasional kita. Hal ini senada dengan apa yang dipaparkan HR. Tilaar (2013: 4) Pendidikan nasional merupakan suatu proses pengembangan sumber daya manusia Indonesia, maka tujuan pendidikan nasional –khususnya di dalam menapaki abad 21 yang penuh dengan persaingan dalam berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, - ialah membangun manusia Indonesia unggul agar mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah dalam berbagai kehidupan tersebut bukan hanya di dalam skala nasional tetapi juga dalam skala internasional. Maka, dalam mencapai visi terwujudnya masyarakat yang mandiri, maju, adil dan makmur pendidikan menjadi aspek yang strategis, serta menjadi faktor yang harus diprioritaskan dalam pencapaian visi tersebut.

Sebuah keniscayaan pendidikan nasional menuju 2025 dituntut mencetak manusia yang berdaya saing dan mempunyai produktivitas tinggi. Dengan anggaran 20% dari APBN, Indonesia

bertekad memenuhi tuntutan tersebut. Namun berdasarkan fakta dilapangan Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain. Ini terlihat dari indeks persaingan yang masih kalah dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

No	Negara	Peringkat
1	Singapura	2
2	Malaysia	25
3	Brunei Darussala	28
4	Thailand	38
5	Indonesia	50
6	Filipina	65
7	Vietnam	75
8	Kamboja	85
9	Timor leste	136

(Sumber: Bappenas 2012)

Selain indeks daya saing kita yang masih kalah oleh beberapa negara kawasan di ASEAN, daya saing negara kita juga masih berada dalam peringkat yang kurang memuaskan. Daya saing kita berdasarkan *World Economy Forum* kita berada pada posisi 46 pada tahun 2011.

Globalisasi menjadi perhatian dalam kesuksesan menyambut pendidikan nasional 2025. Sejarah globalisasi disulut oleh niat negara-negara industri maju mengkonsentrasikan upaya pada



“Research & Development” untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi dengan muatan ilmu pengetahuan mutakhir sehingga dengan demikian mereka mendapatkan peluang untuk memenangkan pasar dengan keunggulan kompetitifnya. Kemudian mereka alihkan teknologi industri yang kokoh yang mereka kembangkan dengan infra-strukturnya yang padat investasi itu ke negara-negara ‘berkembang’ melalui apa yang disebut “transfer/alih teknologi”.

Maka globalisasi dalam konteks ini menjadi bermakna: kompetisi ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Implikasinya adalah munculnya istilah “ekonomi pengetahuan”, yaitu ekonomi yang dasarnya dan atau produknya adalah pengetahuan. Hal ini pada umumnya melibatkan kegiatan penelitian yang dilakukan di perguruan-perguruan tinggi ataupun lembaga-lembaga penelitian. Arus globalisasi yang begitu deras membuat manusia terjebak dalam apa yang disebutkan Anthony Giddens sebagai *“manufactured uncertainty”* atau sebuah ketidakpastian buatan. Agar tidak terjebak dalam arus informasi yang tidak pasti, konsep manusia unggul perlu dikembangkan.

Selain mengembangkan konsep manusia unggul pendidikan 2025 adalah upaya mewujudkan kemandirian bangsa. Kemandirian yang dimaksud dalam konteks ini adalah bukan mematikan ketergantungan terhadap bangsa lain, melainkan melepaskan ketergantungan tersebut. Dalam era globalisasi sebuah kemustahilan ketika suatu bangsa tidak mempunyai ketergantungan/keterbukaan terhadap bangsa lain. Kita bisa melihat contoh hari ini adalah negara Cina atau Tiongkok. Dalam

era globalisasi keterbukaan/ketergantungan antar bangsa adalah sebuah keniscayaan.

Dalam rangka mencapai kemandirian bangsa pendidikan yang bermutu adalah kuncinya. Pendidikan yang bermutu akan mempercepat proses pembangunan di semua sektor di sisi yang lain pendidikan akan dirasa tumpul apabila *output* yang dihasilkan ternyata tidak terserap pada dunia kerja. Pembangunan pendidikan harus berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat.

Indonesia masih menghadapi permasalahan konseptual yang kronis, keberhasilan pembangunan, pendidikan, masih diukur dengan IKK (Indikator Keberhasilan), tetapi masih digunakan secara masive didunia jenjang pendidikan. Tetapi tahun 1990 Indonesia berhasil mencapai APM -SD >95 % (APM = Angka Partisipasi Masyarakat), hanya dalam 3 dasawarsa.

Indikator kunci Keberhasilan yang cukup usang yaitu UN yang justru lebih banyak mengukur pengetahuan ketimbang mengukur capaian standar pendidikan nasional. Jika UN dipermasalahkan, maka persoalan yang sesungguhnya bukan terletak pada "Ujian" itu sendiri karena ujian adalah konsep yang intern didalam suatu sistem pendidikan dimanapun.

Pendidikan 2025 merupakan sebuah kajian analisis bagaimana pendidikan kita menyongsong tahun 2025. Mengapa 2025 menjadi tahun yang penting dan begitu amat keramat? Selain tahun 2025 adalah proses akhir dari RPJPN yang ditetapkan pada tahun 2005, tahun 2025 adalah tahun awal dari puncak bonus demografi yang akan dialami Indonesia mulai tahun 2025 sampai tahun 2035.



Bonus demografi tidak hanya memberikan peluang, namun juga tantangan. Jika tidak mampu memanfaatkan peluang ini, Indonesia akan mengalami jebakan kelas menengah (*Middle income trap*), kita bisa melihat contoh yang sudah terjadi pada negara-negara lain, seperti Filipina dan beberapa negara di Amerika Latin.

Negara-negara tersebut tidak mampu memperbaiki kualitas SDM-nya sehingga produk dan SDMnya tidak dapat bersaing dan menjadi tamu di negaranya sendiri. Jika bangsa Indonesia tidak mampu menyiapkan momen ini, yakni akan terjadinya bonus demografi, seperti penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM, baik dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara (www.bkkbn.go.id, 2009).

Berkaca dari hal tersebut selagi masih ada waktu dan kesempatan peningkatan dunia pendidikan harus segera kita lakukan. Mencetak pemimpin yang profesional dalam dunia pendidikan menjadi langkah awal dalam menyongsong bonus demografi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa sebaik apapun sistem pendidikan yang tidak dikelola oleh orang profesional maka akan menjadi tidak efektif, efisien serta sia-sia.

Kepala madrasah sebagai salah satu pengelola pendidikan perlu mendapat perhatian khusus. Sebagai pengelola sistem kepala madrasah dituntut untuk profesional. Menilik strategisnya peran kepala madrasah dalam menyongsong pendidikan 2025, realita yang ada masih banyak ditemukan beberapa masalah. Antara lain:

- 1) Kurangnya informasi, kesiapan dan kompetensi sebagai kepala

madrasah yang cakap dan terampil (khususnya bagi kepala madrasah pemula); 2) Lemahnya manajemen dan supervisi sekolah yang dimiliki oleh kepala madrasah terutama dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja sekolah; 3) Pengetahuan administrasi sekolah yang dikuasai oleh kepala madrasah masih kurang. Oleh karena itu perlu didukung oleh tim kerja administrasi yang handal (terampil); 4) Kurang optimalnya proses belajar di sekolah, hal ini tampak dari hasil belajar yang belum mencapai ketuntasan, tidak bervariasinya penggunaan alat peraga yang ada, pengelolaan kelas dan pendampingan siswa yang bermasalah yang belum tertata dan terkelola dengan baik; 5) Kurangnya pengkajian atau analisa terhadap hasil evaluasi dan proses belajar mengajar di sekolah (data hasil evaluasi belajar dan mengajar belum dikaji dan ditindak lanjuti untuk pengembangan sistem pengembangan mutu); 6) Kurang optimalnya kegiatan ekstrakurikuler (minimnya tenaga pengajar serta alokasi penggunaan ruang secara full time).7) Kurang optimalnya peran serta masyarakat (rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi kemajuan anaknya).

Terdapat sepuluh isu strategis untuk dapat menghasilkan gagasan pendidikan menuju 2025: (1) membangun program pendidikan dasar untuk semua, (2) membangun program pendidikan menengah universal, (3) membangun pendidikan persiapan kerja, (4) membangun kelas tinggi bertaraf internasional, (5) memperkuat pengelolaan dalam era desentralisasi dan otonomi, (6) membangun strategi pembiayaan yang berkeadilan, (7) mengembangkan kurikulum dan ujian nasional, (8) membangun



sertifikasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan, (9) membangun pendidikan global, dan (10) penguatan PNFI dalam kerangka *life-long learning*.

Dengan strategi tersebut, diharapkan akan benar-benar tercipta suatu mutu pendidikan Indonesia yang berkualitas. Mutu yang menjadi esensi kualitas pendidikan anak-anak, dan tolak ukur keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Bukankah kalau kita pikir, bagaimana kita mencerdaskan anak bangsa, jika sekolahnya tidak berkualitas? Anak bangsa seperti apa yang akan terbentuk dari sekolah yang tidak bermutu? Maka harus kita gariskan bersama, memperbaiki mutu pendidikan adalah point utama untuk menuju 2025 masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, dan kompetitif.

B. Konsep Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif lahir sebagai bentuk ketidak puasan penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan sistem segregasi. Sistem segregasi adalah sistem penyelenggalan sekolah yang diperuntukan bagi anak-anak yang memiliki kelainan atau anak-anak berkebutuhan khusus. Sistem ini dipandang bertentangan dengan tujuan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dimana tujuan penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah untuk mempersiapkan mereka untuk dapat berinteraksi dengan mandiri di lingkungan masyarakat. Namun dalam proses penyelenggaraan pendidikan, sistem segregasi justru di pisahkan dengan lingkungan

masyarakat, khususnya terjadi di masyarakat kita berangkat dari kenyataan tersebut, lahirlah beberapa konsep pendidikan inklusif

Menurut **Budianto** (2006), sistem segregasi tidak mampu lagi mengemban misi utama pendidikan, yaitu memanusiaikan manusia. Sistem segregasi cenderung diskriminatif, eksklusif, mahal, tidak efisien, serta outputnya pun belum menjanjikan sesuatu yang positif. Disebut pula oleh **Reynolds** dan **Birch** (1988), bahwa model segregasi tidak menjamin kesempatan anak berkecukupan berkembang potensi secara optimal, karena kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa. Hal itu secara filosofis model segregasi tidak logis, karena menyiapkan peserta didik untuk kelak dapat berinteraksi dengan masyarakat normal, tetapi faktanya mereka dipisahkan dari masyarakat normal.

Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak yang lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Menurut Direktorat Pembinaan SLB (2007), pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama. Di sekolah umum dengan memerhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal. Semangat pendidikan inklusif akan memberi akses yang luas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.



Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan direktorat pembinaan SLB (2007), sebagai wadah yang ideal, pendidikan inklusif memiliki empat karakteristik makna, yaitu :

1. Pendidikan inklusif yang berjalan terus dalam usaha menemukan cara-cara merespon keragaman individu anak.
2. Pendidikan inklusif berarti memperoleh cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan anak dalam belajar
3. Pendidikan inklusif berarti membawa makna anak mendapat kesempatan untuk hadir di sekolah, berpartisipasi, dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya
4. Pendidikan inklusif di peruntukan bagi anak yang tergolong marginal, eksklusif, dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar.

Definisi inklusif disampaikan oleh **Dianne dan Brandy Reese** (2002) bahwa :

“inclusion can be defined as the act of being present at regular education classes with the support and service needed to successfully achieve education goals. Inclusion in the scholastic environment benefits both the disabled student and the non-disabled student in obtaining life skills. by including all student as much possible in general or regular education all classes all students can learn to work cooperatively, learn to work with different kinds of people in taks “

Pernyataan **Tirocchi** tersebut, menunjukkan bahwa keberadaan anak berkebutuhan khusus di kelas regular merupakan sesuatu yang penting untuk mencapai tujuan pembelajaran di kelas. keberadaan anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif bermanfaat

bagi semua anak, khususnya dalam pengembangan kompetensi sosial dan peningkatan kecakapan hidup. Hal ini dapat terwujud manakala anak berkebutuhan khusus kerjasama secara sinergis dengan anak-anak lain dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik sekolah.

Menurut **Sharon rustemer** (2002), yang dilaporkan pada center of study in inclusive education (CSIE) , pendidikan inklusif didefinisikan sebagai berikut “ *inclusive education learning together in ordinary pre-school provision, schools, colleges and universities with appropriate network of support*”. Dengan demikian, pendidikan inklusif dapat diikuti oleh semua orang dengan tanpa keterbatasan dan dapat berlangsung di setiap jenjang pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi

Selanjutnya, SCIES menyatakan bahwa “*inclusion means enabling all students to participate fully in the life and work of mainstreaming setting, whatever their needs*”. Dengan kata lain, semua siswa tanpa memandang jenis kebutuhan diperbolehkan unruk bersam-sama hidup dan bekerja dalam lingkungan umum(lumrah)

Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang menghargai manusia:

1. Diciptakan sebagai makhluk yang berbeda-beda (unik)
2. Menghargai dan menghormati bahwa semua orang merupakan bagian dari masyarakat, dan

3. Diciptakan untuk membangun sebuah masyarakat, sehingga masyarakat normal ditandai dengan adanya keberagaman dari setiap anggota masyarakat

Model pendidikan khusus tertua adalah model segregasi yang menempatkan anak berkelainan di sekolah-sekolah khusus, terpisah dari teman sebayanya. Sekolah-sekolah ini memiliki kurikulum, metode mengajar, sarana pembelajaran, system evaluasi, dan guru khusus. Dari segi pengelolaan, model segregasi memang menguntungkan, karena mudah bagi guru dan administrator. Namun demikian, dari sudut pandang peserta didik, model segregasi merugikan. Disebutkan oleh **Reynolds dan Birch** (1988), antara lain bahwa model segregatif tidak menjamin kesempatan anak berkelainan mengembangkan potensi secara optimal, karena kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa. Kecuali itu, secara filosofis model segregasi tidak logis, karena menyiapkan peserta didik untuk kelak dapat berintegrasi dengan masyarakat normal, tetapi mereka dipisahkan dengan masyarakat normal. Kelemahan lain yang tidak kalah penting adalah bahwa model segregatif relatif mahal.

Model yang muncul pada pertengahan abad XX adalah model mainstreaming. Belajar dari berbagai kelemahan model segregatif, model mainstreaming memungkinkan berbagai alternatif penempatan pendidikan bagi anak berkelainan. Alternatif yang tersedia mulai dari yang sangat bebas (kelas biasa penuh) sampai yang paling terbatas (sekolah khusus sepanjang hari). Oleh karena itu, model ini juga dikenal dengan model yang paling tidak terbatas (*the least restrictive environment*), artinya seorang anak berkelainan

harus ditempatkan pada lingkungan yang paling tidak terbatas menurut potensi dan jenis / tingkat kelainannya.

Secara hirarkis, **Deno** (1970) mengemukakan alternatif sebagai berikut:

1. Kelas biasa penuh,
2. Kelas biasa dengan tambahan bimbingan di dalam,
3. Kelas biasa dengan tambahan bimbingan di luar kelas,
4. Kelas khusus dengan kesempatan bergabung di kelas biasa,
5. Kelas khusus penuh,
6. Sekolah khusus, dan
7. Sekolah khusus berasrama.

Adapun menurut **Heiman** (2004), terdapat 4 model pendidikan inklusif, yaitu:

1. *In-and-out*
2. *Two-teachers*
3. *Full inclusion*
4. *Rejection of inclusion*

Model in-and-out adalah model pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus dimana anak-anak tersebut keluar masuk kelas reguler pada pembelajaran tertentu. **Model two-teachers** adalah model pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan dua orang guru, yaitu guru reguler dan guru pembimbing khusus (GPK). **Model full inclusion** adalah model pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus dimana anak-



anak berkebutuhan khusus secara penuh mengikuti proses pembelajaran bersama-sama dengan siswa-siswa reguler lainnya di kelas yang sama. **Model rejection of inclusion** adalah model pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus dimana siswa-siswa berkebutuhan khusus belajar terpisah dengan siswa-siswa reguler lainnya.

Anak berkebutuhan khusus dapat berpindah dari satu bentuk layanan ke bentuk layanan yang lain, seperti:

1) Bentuk kelas reguler penuh

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama.

2) Bentuk kelas reguler dengan cluster

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus.

3) Bentuk kelas reguler dengan pull out

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

4) Bentuk kelas reguler dengan cluster dan pull out

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar bersama dengan guru pembimbing khusus.

5) Bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian

Anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler.

6) Bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler

Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.

Dengan demikian, pendidikan inklusif seperti pada model di atas tidak mengharuskan semua anak berkebutuhan khusus berada di kelas reguler setiap saat dengan semua mata pelajarannya (inklusi penuh). Hal ini dikarenakan sebagian anak berkebutuhan khusus dapat berada di kelas khusus atau ruang terapi dengan gradasi kelainannya yang cukup berat. Bahkan bagi anak berkebutuhan khusus yang gradasi kelainannya berat, mungkin akan lebih banyak waktunya berada di kelas khusus pada sekolah reguler (inklusi lokasi). Kemudian, bagi yang gradasi kelainannya sangat berat, dan tidak memungkinkan di sekolah reguler (sekolah biasa), dapat disalurkan ke sekolah khusus (SLB) atau tempat khusus (rumah sakit).

Sebelum berkembangnya Pendidikan inklusif, telah dikenal beberapa konsep yang mengarah menuju pendidikan inklusif. Konsep konsep itu antara lain:

1. Normalisasi

Konsep normalisasi jika diartikan dari struktur bahasa berarti “menormalkan”, atau membuat normal sesuatu yang tidak normal. Namun, dalam konteks isu pendidikan, normalisasi berarti



memandang setiap orang untuk hidup dari kacamata kebutuhan hidup orang pada umumnya. Kebutuhan hidup orang pada umumnya meliputi kebutuhan pendidikan, kesehatan, perlakuan adil dimata hukum, kualitas hidup layak, dan lain-lain. Dalam pengertian lain, normalisasi adalah melihat para penyandang cacat, didalamnya termasuk anak berkebutuhan khusus, dari perspektik masyarakat secara umum.

Normalisasi memandang bahwa penyandang cacat dan ABK merupakan bagian dari masyarakat secara umum. Dulu kita mengenal kebijakan tentang penanggulangan masalah-masalah penyandang cacat merupakan tanggung jawab departemen sosial. Kini kebijakan itu sudah tidak relevan. Kebijakan penanggulangan penyandang cacat dan anak-anak berkebutuhan khusus adalah tanggung jawab semua pihak.

2. Integrasi (pendidikan terpadu)

Pendidikan terpadu merupakan istilah umum mengenai kehadiran seseorang anak disekolah reguler. Istilah ini juga mengacu pada proses mentransfer siswa ke wilayah yang kurang tersegregasi. Ada sistem integrasi seorang anak yang masuk kelas reguler namun berada diunit khusus atau kelas terpisah, tetap dapat dikategorikan terintegrasi. Ini karena ia lebih berkesempatan berinteraksi dengan anggota komunitas sekolah umum daripada jika ia diisolasi dalam sekolah khusus. Pada sistem integrasi kesempatan untuk berinteraksi dapat terjadi jika anak tersebut diintegrasikan ke dalam sekolah reguler.

3. *Mainstream*

Istilah *mainstream* tidak jauh berbeda dengan integrasi. *mainstream* merupakan sistem pendidikan di mana seseorang siswa terdaftar atau berpartisipasi di kelas reguler.

4. Pendidikan inklusif

Definisi inklusi menurut *new york city board of education* adalah suatu metode yang menyediakan layanan pendidikan khusus pada lingkungan yang hampir tidak terbatas.

C. Pendidikan Inklusif Sebagai Praktek Pengembangan Mutu Pendidikan

Tahukah Anda bahwa pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang tidak membeda-bedakan latar belakang kehidupan anak karena keterbatasan fisik maupun mental. Penafsiran tentang pendidikan inklusif sesungguhnya cukup beragam sesuai dengan sudut pandang pengkaji dalam menguraikan makna substansial dari pendidikan inklusif itu sendiri. Keragaman penafsiran tentang pendidikan inklusif menjadi sangat penting karena istilah tersebut agaknya memiliki kemiripan dengan pendidikan khusus atau terpadu.

Meskipun definisi tentang pendidikan inklusif bersifat progresif dan terus berubah, tetap diperlukan kejelasan konsep yang terkandung di dalamnya. Sebab, banyak orang menganggap bahwa pendidikan inklusif sebagai versi lain dari pendidikan khusus/PLB (*special education*). Bila dicermati, konsep yang mendasari pendidikan inklusif sangat berbeda dengan konsep yang mendasari



pendidikan khusus. Inklusi atau pendidikan inklusif bukanlah istilah lain dari pendidikan khusus. Konsep pendidikan inklusif mempunyai banyak kesamaan dengan konsep yang mendasari pendidikan untuk semua dan konsep tentang perbaikan sekolah.

Konsep pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang mempresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara. Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menampung semua anak berkebutuhan khusus ataupun anak yang memiliki kesulitan membaca dan menulis. Tidak heran bila konsep pendidikan inklusif dianggap bisa mewakili konsep konsep pendidikan luar biasa yang diselenggarakan pemerintah dalam dekade terakhir ini.

Kendati pendidikan inklusif terlalu luas untuk menampung segala aspek yang berkebutuhan khusus. Namun, ia merupakan suatu strategi yang dapat mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat. Dengan Kata Lain, pendidikan inklusif menjamin akses dan kualitas anak sesuai dengan tingkat kemampuan dan menjamin kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan baik.

Sebagai konsep pendidikan terpadu, pendidikan inklusif memang mencerminkan pendidikan untuk semua tanpa terkecuali, apakah dia mengalami keterbatasan fisik atau tidak memiliki kemampuan secara finansial. Tidak heran bila konsep pendidikan inklusif dikatakan sebagai konsep ideal dalam mereformasi sistem

pendidikan yang cenderung diskriminatif terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang cacat.

Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusif juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap antidiskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun, serta upaya mengubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus.

Luasnya cakupan pendidikan inklusif memungkinkan kita untuk membantu keterbatasan mereka dalam memperoleh kemudahan di bidang pendidikan sehingga tidak merasa terpinggirkan dari anak-anak normal lainnya. Keberadaan pendidikan inklusif bukan saja penting untuk menampung anak yang berkebutuhan khusus dalam sebuah sekolah yang terpadu, melainkan pula dimaksudkan untuk mengembangkan potensi dan menyelamatkan masa depan mereka dari diskriminasi pendidikan yang cenderung mengabaikan anak-anak berkelainan.

Menyelamatkan masa depan anak Indonesia adalah kewajiban kita bersama untuk membangkitkan diri demi membantu cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita seringkali beranggapan bahwa yang harus dicerdaskan adalah mereka yang terlahir normal dan memiliki tingkat kecerdasan tinggi. Padahal, anak berkelainan atau penyandang cacat juga



memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan dengan fasilitas yang memadai pula.

Dalam konteks pendidikan luar biasa di Indonesia, pendidikan inklusif bukanlah satu-satunya cara mendidik *disabled children* dengan maksud untuk menggantikan pendidikan segregasi yang sebelumnya dipakai sebagai konsep pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Akan tetapi, suatu alternatif, pilihan, inovasi atau terobosan/pendekatan baru disamping pendidikan segregasi yang sudah berjalan lebih dari satu abad.

Hal ini disebabkan *setting* pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa di Indonesia menganut pendekatan *Multi-track Approach*. Eksistensi Sekolah Luar Biasa hanya saja yang seharusnya mampu berperan sebagai pusat sumber dalam mendukung inklusi, belum diberdayakan secara maksimal. Akibatnya, anak-anak penyandang cacat kurang mendapatkan perhatian penuh dan seringkali terabaikan dalam lingkungan dan sekolah mereka.

Secara formal, pendidikan inklusif di Indonesia baru dilaksanakan dalam satu dasawarsa terakhir. Namun, diyakini bahwa secara alamiah pendidikan inklusif sudah berlangsung sejak lama. Hal ini tidak lepas dari faktor-faktor filosofi, sosial, maupun budaya Indonesia yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi kebhinnekaan atau keberagaman.

Faktor-faktor ini tentu dapat menjadi modal dasar bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusi yang sekarang yang sedang digalakkan secara konseptual memang terdapat

perbedaan dan kaitan yang erat antara pengertian sekolah inklusif, pendidikan inklusif, dan masyarakat inklusif (Alimin, 2005).

Di Indonesia sendiri, pendidikan inklusif secara resmi didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik (Direktorat PSLB, 2004).

Definisi itu menunjukkan bahwa sekalipun secara konseptual pendidikan inklusi mengikutkan semua anak berkebutuhan khusus, tetapi di negara kita lebih banyak dipahami atau ditekankan sebagai upaya mengikutkan anak berkelainan dalam *setting* sekolah reguler. Paradigma ini tentu saja sudah keliru, karena yang dimaksudkan dengan pendidikan inklusif adalah keseluruhan aspek yang berkaitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus tanpa terkecuali.

Pendidikan inklusif tampaknya dapat mengatasi kekurangan-kekurangan yang telah diterapkan oleh sistem segregasi, tetapi tidak bermaksud mengesampingkan kontribusi sistem segregasi yang terlebih dahulu berkembang. Penulis mengartikan pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang memberikan layanan terbuka bagi siapa saja yang memiliki keinginan untuk mengembangkan potensi-potensinya secara optimal.



Namun, dalam pandangan Staub dan Peck (1995: 36), pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apa pun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya.

Sementara itu, O'Neil (1995 :7-11) menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani disekolah-sekolah terdekat, dikelas reguler bersama-sama teman seusianya. Melalui pendidikan inklusif anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Model pendidikan ini berupaya memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak, termasuk anak tunanetra agar memperoleh kesempatan belajar yang sama. Mana semua anak memiliki akses yang sama ke sumber-sumber belajar yang tersedia dan sarana yang dibutuhkan tunanetra dapat terpenuhi dengan baik. Maka tak berlebihan, jika sekolah reguler dengan orientasi inklusi merupakan alat paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusi yang dan mencapai "pendidikan bagi semua" (education for all).

Pernyataan Salamanca (1994) dan Kerangka Aksi Dakar (1997) paragraph 4 menyatakan bahwa *inklusive education seeks to address the learning needs of all children, youth and adults with a specific focus on those who are vulnerable to marginalisation and exclusion* (UNESCO, 2006). Pernyataan ini jelas memberikan gagasan tentang

pentingnya membangun kesadaran kepada anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusif yang berupaya memperjuangkan hak-hak mereka agar tidak selalu termarginalkan dalam lingkungan mereka tinggal.

Pengertian pendidikan inklusif bukan bermaksud memberikan pelabelan negatif kepada anak yang berkebutuhan khusus, melainkan lebih daripada itu sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi mereka agar diterima disekolah sekolah umum atau pendidikan formal. Jenis-jenis pendidikan luar biasa seperti SLB tampaknya tidak memberikan jaminan kepada mereka untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam jenjang pendidikan yang lebih berkualitas. Bahkan, keberadaan SLB seolah mencerminkan kebijakan yang tidak berkeadilan karena sesungguhnya mereka memiliki keinginan untuk belajar disekolah umum guna bersinergi dengan anak-anak normal pada umumnya.

Pelabelan dan pengkategorian siswa menjadi anak normal atau berkelainan sesungguhnya merupakan pelabelan yang menyesatkan dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan mereka ketika memasuki dunia dunia pendidikan. Pengkategorian sebagai penyebab pelabelan pada gilirannya dapat membuat anak berkebutuhan khusus merasa rendah diri dan tidak mau bekerja sama dengan alasan takut kurang dihargainataupun dihina oleh sesama temannya yang memiliki fisik normal. Padahal, Pelabelan dengan menggunakan sistem segregasi sejatinya bertentangan dengan hak asasi manusia dan melanggar hakikat pendidikan yang sebenarnya, yaitu menciptakan kesetaraan dengan sesama anak



didik tanpa membedakan derajat atau latar belakang kehidupan mereka.

Pendidikan inklusif tidak boleh terfokus pada kekurangan dan keterbatasan mereka, tetapi harus mengacu pada kelebihan dan potensinya agar lebih berkembang. Sebagaimana yang dikemukakan Dirjen PLB mengenai pendidikan inklusif (2005). bahwa konsep pendidikan ini adalah memberikan sistem layanan yang mensyaratkan agar anak berkebutuhan khusus dilayani disekolah-sekolah terdekat maupun disekolah-sekolah terdekat maupun disekolah reguler bersama dengan teman-teman sebaya mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan restrukturasi sekolah yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan khusus anak sehingga dapat menciptakan keseimbangan dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga mereka tidak merasa terpinggirkan.

Mutu pendidikan mutlak harus didasari oleh proses. Tidak akan ada pendidikan yang bermutu tanpa proses yang bermutu. Pendidikan inklusif sangat memperhatikan mutu proses. Sekolah yang mengakomodasi semua anak meletakkan fleksibilitas dan kebutuhan anak sebagai sesuatu yang utama. Selanjutnya pendidikan yang bersifat inklusif menempatkan anak untuk saling mendukung satu dengan lainnya untuk maju bersama menurut kekuatan dan kemampuan masing-masing (kooperatif) bukan kompetitif.

Pandangan ini melihat bahwa perbedaan merupakan kesempatan untuk belajar. Jadi mutu itu dapat dilihat apabila anak/siswa berkembang optimal sesuai dengan kapasitas

masing-masing. Dengan kata tidak ada penyeragaman. Dalam tradisi pendidikan kita, kualitas pendidikan sering dipandang semata-mata sebagai hasil pencapaian prestasi akademik dengan melihat angka hasil ujian. Pandangan seperti ini membuat makna pendidikan menjadi sangat sempit, sementara pendagan pendidikan inklusif memaknai mutu pendidikan lebih luas dan mendasar yaitu berkenaan dengan semua aspek perkembangan anak.

Terkait dengan upaya pengembangan pendidikan inklusif, Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE), sebuah lembaga studi pendidikan inklusif di Fenchay, Bristol mengenalkan enam poin piagam pendidikan inklusif yang dikenal sebagai “The Charter’s Six Points”, sebagai berikut:

1. *We fully support an end to all segregated education on the grounds of disability or learning difficulty, as a policy commitment and goal for this country.*

(Kami mendukung sepenuhnya untuk mengakhiri semua pendidikan terpisah dengan alasan kecacatan atau kesulitan belajar, sebagai komitmen dan tujuan kebijakan untuk negara ini.)

2. *We see the ending of segregation in education as a human rights issue which belongs within equal opportunities policies.*

(Kami melihat berakhirnya segregasi dalam pendidikan sebagai masalah hak asasi manusia yang termasuk dalam kebijakan kesempatan yang sama.)



- 3. *We believe that all students share equal value and status. We therefore believe that the exclusion of students from the mainstream because of disability or learning difficulty is a devaluation and is discriminating.***

(Kami percaya bahwa semua siswa memiliki nilai dan status yang sama. Karena itu kami percaya bahwa pengecualian siswa dari arus utama karena kecacatan atau kesulitan belajar adalah devaluasi dan mendiskriminasi.)

- 4. *We envisage the gradual transfer of resources, expertise, staff and students from segregated special schools to an appropriately supported, diverse and inclusive mainstream.***

(Kami membayangkan transfer sumber daya, keahlian, staf, dan siswa secara bertahap dari sekolah terpisah ke arus utama yang didukung secara tepat dan beragam.)

- 5. *We believe that segregated education is a major cause of society's widespread prejudice against adults with disabilities or difficulties and that efforts to increase their participation in community life will be seriously jeopardised unless segregated education is reduced and ultimately ended. De-segregating special education is therefore a crucial first step in helping to change discriminatory attitudes, in creating greater understanding and in developing a fairer society.***

(Kami percaya bahwa pendidikan terpisah adalah penyebab utama dari prasangka masyarakat terhadap orang dewasa yang cacat dan mereka yang mengalami kesulitan dalam belajar dan

bahwa upaya untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat akan sangat terancam kecuali pendidikan yang terpisah dikurangi dan pada akhirnya berakhir. Oleh karena itu, memisahkan pendidikan khusus merupakan langkah penting pertama dalam membantu mengubah sikap diskriminatif, dalam menciptakan pemahaman yang lebih besar dan dalam mengembangkan masyarakat yang lebih adil.)

6. For these reasons we call on Central and Local Governments to do all in their power to work as quickly as possible towards the goal of a desegregated education system.

(Karena alasan-alasan ini kami menyerukan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan semua yang mereka mampu untuk bekerja secepat mungkin menuju tujuan sistem pendidikan yang terpisah.)

Salah satu kekuatan utama dari pendekatan hak asasi manusia terhadap pendidikan adalah pengakuan bahwa hak-hak siswa untuk menikmati pendidikan inklusif disertai dengan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya. Dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak di Indonesia 1991, Pemerintah Inggris menerima kewajiban yang ditetapkan dalam Konvensi dan setuju untuk bertanggung jawab atas penerapan prinsip-prinsipnya. Mengakhiri segregasi dalam pendidikan adalah tanggung jawab yang belum terpenuhi.



BAB IV

WAJAH PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA

A. Perkembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia

Sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Scandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia). Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar Pendidikan Luar Biasa ke Scandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan Least restrictive environment, yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya di Inggris dalam Ed.Act. 1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif.

Pendidikan inklusif telah menjadi perhatian masyarakat dunia. Beberapa pertemuan internasional mendasari pergerakan menuju pendidikan yang berkualitas bagi semua anak melalui pendidikan inklusi. Landasan hukum dan landasan konseptual menjadi landasan bagi gerakan menuju pendidikan inklusif. Termasuk Indonesia, diantaranya adalah:

1. Deklarasi hak asasi manusia, 1948
2. Konveksi hak anak, 1989
3. Konferensi dunia tentang pendidikan untuk semua, 1990
4. Persamaan kesempatan bagi orang berkelainan, 1993
5. Pernyataan salamanca tentang pendidikan inklusi, 1994
6. Komitmen dasar mengenai pendidikan untuk semua, 2000
7. Deklarasi Bandung tahun 2004

Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata terutama sejak diadakannya konvensi dunia tentang hak anak pada tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi *'education for all'*. Implikasi dari statemen ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa kecuali (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Sebagai tindak lanjut deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal dengan *'the Salamanca statement on inclusive education'*

Pernyataan Salamanca diantaranya ditekankan :

- Hak semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan temporer dan permanen untuk memperoleh penyesuaian pendidikan agar dapat mengikuti sekolah.
- Hak semua anak untuk bersekolah di komunitas rumahnya dalam kelas – kelas inklusif.



- Hak semua anak untuk ikut serta dalam pendidikan yang berpusat pada anak yang memenuhi kebutuhan individual.
- Pengayaan dan manfaat bagi mereka semua yang terlibat akan diperoleh melalui pelaksanaan pendidikan inklusif.
- Hak semua anak untuk ikut serta dalam pendidikan berkualitas yang bermakna bagi setiap individu.
- Keyakinan bahwa pendidikan inklusif akan mengarah pada sebuah masyarakat inklusif dan akhirnya pada keefektifan biaya.

Melihat kembali ke dalam sejarah dimana beberapa peristiwa yang dipublikasi berikut ini:

1. 1948 : Deklarasi Hak Asasi Manusia – termasuk hak atas pendidikan dan partisipasi penuh di masyarakat untuk semua orang – PBB
2. 1989 : Konvensi Hak Anak (PBB, diumumkan tahun 1991)
3. 1990 : Pendidikan untuk semua : Konferensi dunia tentang Pendidikan untuk semua di Jomtien, Thailand, menghasilkan tujuan utama berikut ini :
 - Membawa semua anak masuk sekolah
 - Memberikan semua anak pendidikan yang sesuai

Dalam prakteknya sesungguhnya ini tidak mencakup anak – anak yang berkebutuhan khusus (UNESCO, diumumkan tahun 1991 dan 1992)

4. 1993 : Peraturan Standar tentang kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat (PBB, diumumkan tahun 1994).

5. 1994 : Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusif (UNESCO diumumkan pertama tahun 1994, laporan akhir tahun 1995.

Sebenarnya proses menuju pendidikan inklusif di Indonesia diawali pada tahun 1960-an oleh beberapa orang siswa tunanetra di Bandung dengan dukungan organisasi para tunanetra sebagai satu kelompok penekan. Pada masa itu SLB untuk tunanetra hanya memberikan layanan pendidikan hingga tingkat SLTP. Sesudah itu para pemuda tunanetra diberi latihan kejuruan dalam bidang kerajinan tangan atau pijat. Sejumlah pemuda tunanetra bersikeras untuk memperoleh tingkat pendidikan lebih tinggi dengan mencoba masuk ke SMA biasa meskipun ada upaya penolakan dari pihak SMA itu. Lambat laun terjadi perubahan sikap masyarakat terhadap kecacatan dan beberapa sekolah umum bersedia menerima siswa tunanetra.

Pada akhir tahun 1970-an pemerintah mulai menaruh perhatian terhadap pentingnya pendidikan integrasi dan salah satu usaha pemerintah yaitu dengan mengundang Hellen Keller International, Inc. Untuk membantu mengembangkan sekolah integrasi. Keberhasilan proyek ini telah menyebabkan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan nomor 002/U/1986 tentang pendidikan terpadu bagi Anak Cacat yang mengatur bahwa anak penyandang cacat yang memiliki kemampuan seperti yang non-cacat di sekolah biasa. Sayangnya ketika proyek integrasi itu berakhir implementasi pendidikan inklusif semakin kurang dipraktekkan terutama dijenjang SD Johnsen, Berit H & Skjorten, Miriam D (2003:347).



Kemudian, pada tahun 1980-an, pendidikan anak penyandang cacat merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan atau Kesejahteraan sosial. Penting untuk ditunjukkan bahwa semua pendidikan anak seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan sedangkan Kementerian Kesehatan harus menangani kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja menangani pekerjaan.

Akan tetapi menjelang tahun 1990-an upaya baru dilakukan untuk mengembangkan pendidikan inklusif melalui proyek kerja sama antara Depdiknas dan pemerintah Norwegia dibawah manajemen Brailo Norway dan Direktorat PLB. Agar tidak mengulangi kesalahan dimasa lalu dengan program pendidikan integrasi yang nyaris mati, perhatian diberikan pada sustainabilitas program pengimplementasian pendidikan inklusif dan pemerintah memberikan perhatiannya dengan mngeluarkan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan jenjang, jalur, satuan, bakat, minat, dan kemampuannya tanpa diskriminasi.

Dengan kata lain, dalam sektor pendidikan formal seharusnya tidak ada lagi sekat sosial yang membedakan para difabel dengan masyarakat umum. Orang tua bisa mendaftarkan anak difabel mereka ke sekolah umum. UU No. 4 Tahun 1997 pasal 12 mewajibkan lembaga-lembaga pendidikan umum menerima para difabel sebagai siswa. Kewajiban seperti inilah yang disebut sebagai model inklusi. Model inklusi adalah peluang bagi terjadinya interaksi sosial antara para difabel dan masyarakat pada umumnya. Sayangnya, belum banyak difabel yang mengakses sekolah model

inklusi akibat minimnya informasi mengenai sekolah inklusi, ketiadaan biaya, infrastruktur yang kurang mendukung serta kondisi kultural budaya yang cenderung ‘menyembunyikan’ anak difabel karena dianggap sebagai aib. Di Indonesia jumlah anak difabel mencapai 1,8 juta dan yang belum bersekolah sebanyak 1.723. 237 anak. Di Propinsi DIY, dari 6.191 anak difabel yang belum bersekolah sebanyak 2.211 anak dan di Kota Yogya dari 561 anak difabel hanya 50 anak yang belum bersekolah.

Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif, Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Untuk itu ada beberapa progam yang direncanakan yaitu :

1. Diseminasi ideologi pendidikan inklusif melalui berbagai seminar dan lokakarya.
2. Mengubah peranan SLB yang ada agar menjadi pusat sumber untuk mendukung sekolah inklusif (dengan alat bantu mengajar, materi ajar, metodologi, dsb); Penataran/pelatihan bagi guru – guru SLB maupun guru – guru reguler untuk memungkinkan mereka memberikan layanan yang lebih baik kepada anak berkebutuhan khusus dalam setting inklusi.
3. Reorientasi pendidikan guru di LPTK dan keterlibatan universitas dalam program tersebut.
4. Desentralisasi pembuatan keputusan untuk memberikan lebih banyak peran kepada pemerintah daerah dalam implementasi pendidikan inklusif.



5. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan kelompok – kelompok kerja untuk mempromosikan implementasi pendidikan inklusif.
6. Keterlibatan LSM dan organisasi internasional dalam program ini.
7. Menjalin jejaring antar berbagai pihak terkait.
8. Mengembangkan sekolah inklusif perintis.
9. Pembukaan program magister dalam bidang inklusi dan pendidikan kebutuhan khusus.

Hasil yang paling dapat teramati dari program tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sejumlah lokakarya dan seminar tentang pendidikan inklusif baik pada tingkat nasional maupun lokal telah diselenggarakan yang melibatkan para pendidik dan pengelola pendidikan.
2. Sembilan SLB di sembilan provinsi telah dipilih untuk menjadi pusat sumber dan perannya sebagai sumber sedikit demi sedikit menjadi kenyataan dengan tetap mempertahankan peranannya sebagai SLB. *The National Resource Centre in Jakarta, Citeureup Regional Resource Centre in West Java and Payakumbuh Regional Resource Centre in West Sumatra are the three most functional among the nine resource centres. In addition a number of other special schools have been designed to function as supportive centres.*
3. Beberapa universitas sudah mulai memperkenalkan pendidikan inklusif sebagai satu mata kuliah atau sebagai satu topik dalam mata kuliah terkait kepada mahasiswanya.

4. Dosen sejumlah universitas sudah terlibat dalam lokakarya atau seminar tentang pendidikan inklusif.
5. Dinas pendidikan di sejumlah provinsi sudah lebih proaktif dalam mempromosikan pendidikan inklusif.
6. Sebuah kelompok kerja pendidikan inklusif telah terbentuk di Jawa Barat yang anggotanya berasal dari Pusat Sumber Citeureup, Dinas Pendidikan Jawa Barat dan UPI.
7. UNESCO telah aktif terlibat dalam promosi pendidikan inklusif di Jawa Barat.
8. Pada tahun 2002 proyek telah mengembangkan masing – masing tiga sekolah inklusif perintis di 9 provinsi yang memiliki pusat sumber, pada tahun 2003 Depdiknas secara ambisius meningkatkan jumlah tersebut. Sejak saat itu sekitar 2000 anak penyandang cacat sudah ditempatkan di sekolah reguler.
9. Program magister inklusi dan pendidikan kebutuhan khusus dibuka di UPI dengan bantuan teknis dari Universitas Oslo.
10. Namun yang telah benar – benar melaksanakan pendidikan inklusif secara eksklusif telah dilaksanakan seperti antara lain di sekolah Al-Falah Cibubur Jakarta Timur sejak tahun 1996 yang sekaligus dilaksanakan sekolah tersebut dalam programnya besarnya yang dikenal dengan *Beyond Centre and Central Times (BCCT)* dalam kerjasamanya dengan *thalahasse Creative School Florida US*.
11. Sebagai salah satu implementasi itu telah dilaksanakan Lokakarya Nasional tentang Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia 8-14 Agustus 2004 dan



membuat deklarasi nasional dan menghimbau kepada pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri serta masyarakat untuk dapat :

- a. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal.
- b. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan tuntutan masyarakat, tanpa perlakuan deskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural.
- c. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerja sama yang sinergis dan produktif diantara para stakeholders, terutama pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.
- d. Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemenuhan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal.
- e. Menjamin kebebasan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya untuk berinteraksi baik secara

reaktif maupun proaktif dengan siapapun, kapanpun dan di lingkungan manapun dengan meminimalkan hambatan.

- f. Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media massa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan, dan lainnya secara berkesinambungan.
- g. Menyusun Rencana Aksi (Action Plan) dan pendanaanya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan bagi semua anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya Johnsen, dkk (2003:199).

Sedangkan untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukittinggi dengan menghasilkan Rekomendasi Bukittinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusif dunia tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusif. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi kemudian kurang berkembang, dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia, menggunakan konsep pendidikan inklusif.



B. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Indonesia

Konsep pendidikan inklusi muncul dimaksudkan untuk memberi solusi, adanya perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan terutama bagi anak-anak penyandang cacat atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, Pendidikan inklusi memiliki prinsip dasar bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.

Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan:

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
2. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar
3. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah.
4. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran.
5. Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal. 32 ayat 1 yang berbunyi 'setiap warga negara negara berhak mendapat pendidikan', dan ayat 2 yang berbunyi 'setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya'. UU no. 20/2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal. 5 ayat 1 yang berbunyi 'setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu'. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal. 51 yang berbunyi 'anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikana kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pelaksanaan pendidikan inklusi akan mampu mendorong terjadinya perubahan sikap lebih positif dari peserta didik terhadap adanya perbedaan melalui pendidikan yang dilakukan secara bersama-sama dan pada akhirnya akan mampu membentuk sebuah kelompok masyarakat yang tidak diskriminatif dan bahkan menjadi akomodatif terhadap semua orang

C. Implikasi Manajerial Inklusif

Salah satu karakteristik terpenting dari sekolah inklusi adalah satu komunitas yang kohesif, menerima dan responsive terhadap kebutuhan individual siswa. Untuk itu, Sapon-Shevin (dalam Sunardi, 2002) mengemukakan lima profil pembelajaran di sekolah inklusi, yaitu:

- 1. Pendidikan inklusi berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan.**

Guru mempunyai tanggungjawab menciptakan suasana kelas yang menampung semua anak secara penuh dengan menekankan suasana dan perilaku social yang menghargai perbedaan yang



menyangkut kemampuan, kondisi fisik, sosialekonomi, suku, agama, dan sebagainya. Pendidikan inklusi berarti penerapan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas.

2. Mengajar kelas yang heterogen memerlukan perubahan pelaksanaan kurikulum secara mendasar.

Pembelajaran di kelas inklusi akan bergeser dari pendekatan pembelajaran kompetitif yang kaku, mengacu materi tertentu, ke pendekatan pembelajaran kooperatif yang melibatkan kerjasama antarsiswa, dan bahan belajar tematik.

3. Pendidikan inklusi berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif.

Perubahan dalam kurikulum berkaitan erat dengan perubahan metode pembelajaran. Model kelas tradisional di mana seorang guru secara sendirian berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan semua anak di kelas harus bergeser dengan model antarsiswa saling bekerjasama, saling mengajar dan belajar, dan secara aktif saling berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap pendidikannya sendiri dan pendidikan teman-temannya. Semua anak berada di satu kelas bukan untuk berkompetisi melainkan untuk saling belajar dan mengajar dengan yang lain.

4. Pendidikan inklusi berarti penyediaan dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi.

Meskipun guru selalu berinteraksi dengan orang lain, pekerjaan mengajar dapat menjadi profesi yang terisolasi. Aspek terpenting dari pendidikan inklusif adalah pengejaran dengan tim, kolaborasi

dan konsultasi, dan berbagai cara mengukur keterampilan, pengetahuan, dan bantuan individu yang bertugas mendidik sekelompok anak. Kerjasama antara guru dengan profesi lain dalam suatu tim sangat diperlukan, seperti dengan paraprofessional, ahli bina bicara, petugas bimbingan, guru pembimbing khusus, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk dapat bekerjasama dengan orang lain secara baik memerlukan pelatihan dan dorongan secara terus-menerus.

5. Pendidikan inklusi berarti melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan.

Keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung kepada partisipasi aktif dari orang tua pada pendidikan anaknya, misalnya keterlibatan mereka dalam penyusunan Program Pengajaran Individual (PPI) dan bantuan dalam belajar di rumah.



BAB V

MERAJUT BUDAYA PENDIDIKAN INKLUSIF

A. Pendidikan untuk Semua

Pendidikan inklusi adalah sebuah proses pendidikan bagi semua anak. Hal ini melibatkan semua anak tanpa menghiraukan bagaimana kondisi siswa. Sehingga, penyesuaian pendidikan harus dirancang berdasarkan pada kebutuhan khusus dari semua anak. Pendidikan inklusi mengandung konsekuensi bahwa dibutuhkan adanya perubahan di sekolah maupun di lembaga pendidikan lainnya. Pertama, perubahan harus ditekankan lebih pada pengembangan kesadaran sosial, termasuk di dalamnya pengembangan kontak dan komunikasi di antara siswa. Kedua, penyesuaian dari isi pembelajaran dalam rangka menciptakan pendidikan yang lebih bermakna bagi setiap pribadi siswa mesti dilakukan secara baik.

Mengembangkan sekolah untuk semua sebenarnya telah lama diserukan di kancayh internasional, merujuk dari berbagai konferensi, dokumen serta kebijakan, diantaranya adalah:

1. Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989, yang telah ditandatangani oleh semua negara di dunia, kecuali Amerika Serikat dan Somalia; menyatakan bahwa pendidikan dasar

seyogyanya wajib dan bebas biaya bagi semua (pasal 28). Seterusnya perlu diketahui bahwa Konvensi tentang Hak Anak PBB memiliki empat prinsip umum yang menaungi semua pasal lainnya termasuk pasal mengenai pendidikan, yaitu: (1) non-diskriminasi (pasal 2) yang menyatakan secara spesifik tentang penyandang kebutuhan khusus/penyandang cacat; (2) kepentingan terbaik anak; (3) hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan (pasal 6); dan (4) menghargai pendapat anak (pasal 12). Kesemua hak tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan saling berhubungan. Meskipun dalam memenuhi hak atas pendidikan bagi anak berkelainan/berkebutuhan khusus atau penyandang cacat telah disediakan pendidikan di sekolah khusus/sekolah luar biasa, tetapi hal ini dapat melanggar hak mereka “diperlakukan secara non-diskriminatif”, dihargai pendapatnya dan hak untuk tetap berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya.

2. Deklarasi Dunia Jomtien tentang Pendidikan untuk semua di Thailand pada tahun 1990, melangkah lebih jauh daripada Deklarasi Universal dalam pasal III tentang universalisasi akses dan mempromosikan kesetaraan. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa terdapat kesenjangan pendidikan dan bahwa berbagai kelompok tertentu rentan akan diskriminasi dan eksklusif. Hal ini mencakup anak perempuan, orang miskin, anak jalanan dan anak pekerja, penduduk pedesaan dan daerah terpencil, etnik minoritas dan kelompok-kelompok lainnya, dan secara khusus disebutkan para penyandang cacat. Istilah inklusi tidak digunakan dalam Deklarasi Jomtien, tetapi terdapat



beberapa pernyataan yang mengindikasikan pentingnya menjamin bahwa orang-orang dari kelompok marginal mendapatkan akses ke pendidikan umum (Sue Stubbs, 2002: 121). Dalam Deklarasi Jomtien juga dinyatakan bahwa langkah-langkah yang diperlukan perlu diambil untuk memberikan akses ke pendidikan yang sama kepada setiap kategori penyandang cacat/kelainan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan (Pasal II ayat 5)

3. Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan Bagi Penyandang Cacat tahun 1993, terdiri dari peraturan-peraturan yang mengatur semua aspek hak penyandang cacat. Selaras dengan Deklarasi Jomtien, peraturan ini mengfokuskan pada bidang pendidikan, antara lain pendidikan bagi anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus atau penyandang cacat harus merupakan bagian integral dari pendidikan umum. Peraturan Standar PBB menekankan bahwa Negara bertanggungjawab atas pendidikan bagi anak berkelainan/berkebutuhan khusus atau penyandang cacat dan harus: (1) mempunyai kebijakan yang jelas; (2) mempunyai kurikulum yang fleksibel; (3) memberikan materi yang berkualitas, menyelenggarakan pelatihan guru, dan memberikan bantuan yang berkelanjutan. Selain itu dalam Peraturan Standar PBB tersirat bahwa inklusi didukung dengan beberapa kondisi utama, yaitu harus didukung dengan sumber-sumber yang tepat dan dengan kualitas tinggi, jadi bukan pilihan yang murah. Program-program berbasis masyarakat dipandang sebagai dukungan yang penting dalam

pendidikan inklusif; Pendidikan khusus tidak dikesampingkan, sebagai alternatif terutama bagi siswa tunarungu dan buta-tuli apabila pendidikan umum tidak memadai bagi mereka.

4. Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus Tahun 1994, merupakan dokumen internasional utama tentang prinsip-prinsip dan praktek pendidikan inklusif. Prinsip fundamental inklusi yang belum dibahas dalam dokumen sebelumnya dibahas dalam pernyataan dan kerangka aksi ini. Beberapa konsep inti inklusi yang tersirat dalam dokumen tersebut antara lain adalah: (1) anak-anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya; (2) perbedaan adalah normal; (3) sekolah perlu mengakomodasi semua anak; (4) anak penyandang cacat/berkelainan seyogyanya bersekolah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya; (5) partisipasi masyarakat sangat penting dalam inklusi; (7) pengajaran yang terpusat pada anak merupakan inti inklusi; (8) kurikulum yang fleksibel disesuaikan dengan anak; (9) inklusi memerlukan sumber-sumber dan dukungan yang tepat; (10) inklusi penting bagi harga diri manusia dan pelaksanaan hak asasi manusia secara penuh; (11) sekolah inklusif memberikan manfaat bagi semua anak karena membantu menciptakan masyarakat yang inklusif; (12) inklusi meningkatkan efisiensi dan efektifitas biaya pendidikan. Selain itu dalam pasal 2 memberikan argumentasi bahwa: sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan cara yang paling efektif untuk membrantas sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang terbuka,



membangun masyarakat inklusif, dan mencapai pendidikan untuk semua. Lebih dari itu sekolah inklusif memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi sehingga menekan biaya keseluruhan sistem pendidikan.

5. Konferensi Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal tahun 2000. Forum ini diselenggarakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dasawarsa pendidikan untuk semua yang dideklarasikan di Jomtien Thailand pada tahun 1990. Hasil dari evaluasi tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan untuk semua belum tercapai, maka waktu pelaksanaan perlu diperpanjang sampai tahun 2015. Hal ini mendapat kencaman dari komunitas non-Pemerintah. Ini berarti bahwa idealisme Pendidikan Untuk Semua belum dapat diwujudkan. Dalam Forum Dakar pemerintah dan lembaga-lembaga internasional lainnya berjanji untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, inklusif, dan dilengkapi dengan sumber-sumber yang memadai, yang kondusif untuk kegiatan belajar dengan tingkat pencapaian yang didefinisikan secara jelas untuk semua (pasal 8). Kelebihan Konferensi Dakar antara lain adalah bahwa terdapat fokus yang lebih kuat untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasional yang kokoh dan strategi regional untuk implementasi monitoring, yang merupakan kelemahan pada konferensi Jomtien; dan masalah kecacatan disebutkan secara spesifik di dalam beberapa dokumennya (Sue Stubbs, 2002:20). Tidak disebutkannya secara spesifik tentang anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus atau

penyandang cacat dalam Kerangka Aksi Dakar menggugah lembaga-lembaga yang mempromosikan pendidikan inklusif melakukan pertemuan antara UNESCO dan Kelompok Kerja Internasional untuk Penyandang Cacat dan Pembangunan, dan pada tahun 2001 diluncurkan Program Flagship untuk Pendidikan dan Penyandang Cacat. Tujuan Program Flagship tersebut adalah menempatkan isu kecacatan dengan tepat pada agenda pembangunan dan memajukan pendidikan inklusif sebagai pendekatan utama mencapai tujuan Pendidikan Untuk Semua /PUS (Situs web UNESCO EFA Flagship initiative).

6. Deklarasi Bandung dilaksanakan pada 8-14 Agustus 2004 di Bandung Indonesia. Deklarasi tersebut berisi: (1) menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal; (2) menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupan baik fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural; (3) menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerjasama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.



Selain peristiwa dan dokumen tersebut di atas, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB IV Bagian Kesatu Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap warganegara mempunyai hak sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pada Bagian Keempat Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu semua sekolah tentunya dapat menyelenggarakan pendidikan untuk semua warganegara tanpa kecuali.

Berdasarkan kajian tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan dimana semua anak termasuk anak-anak berkelainan/ berkebutuhan khusus memperoleh layanan pendidikan secara inklusif bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya. Semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasi pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, jender, kapabilitas dan lain sebagainya, termasuk anak berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus. Oleh karena itu sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa mengabaikan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka, termasuk anak cacat/berkelainan dan anak berbakat

Sekolah inklusif adalah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka. Hal ini termasuk anak berkelainan/berkebutuhan

pendidikan khusus dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari populasi terpencil dan pengembara, anak dari minoritas linguistik, etnik dan budaya dan anak-anak yang mempunyai kelemahan atau kelompok marginal lain.

Pelaksanaan sekolah inklusif di Indonesia mengacu pada pendapat Vaughn, Bos & Schumn dalam Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2007: 6-10) yang mengemukakan bahwa dalam praktek, istilah inklusi dipakai secara bergantian dengan istilah “mainstreaming” yang diartikan sebagai penyediaan layanan pendidikan yang layak bagi anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan individualnya.

Dengan demikian penempatan anak berkelainan harus dipilih yang paling bebas di antara alternatif layanan yang disediakan dan didasarkan pada potensi dan jenis serta tingkat kelainannya. Penempatan tersebut tidak permanen, tetapi sementara; dengan demikian siswa berkelainan dimungkinkan secara fleksibel pindah dari satu alternatif layanan ke alternatif lainnya, dengan asumsi bahwa intensi kebutuhan khususnya berubah-ubah. Filosofinya inklusi, tetapi dalam prakteknya menyediakan berbagai alternatif layanan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Model ini sering disebut dengan inklusi moderat.

Mengacu pada pendapat Vaughn, Bos & Schumn dalam Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2007:6-10); penempatan anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus di sekolah inklusif di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai model, yaitu: (a) Kelas reguler “ Full Inclusion”; (b) Kelas reguler dengan cluster; (c) Kelas reguler dengan pull out; (d) Kelas reguler



dengan cluster dan pull out; (e) Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian; (f) Kelas khusus penuh. Seterusnya dapat dikaji lebih lanjut tentang model sekolah inklusif di Indonesia sebagai berikut :

1. Kelas reguler “Full Inclusion”

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler/inklusif sepanjang hari dengan menggunakan kurikulum yang sama dengan yang digunakan anak pada umumnya.

2. Kelas reguler dengan cluster

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler/inklusif dalam kelompok khusus.

3. Kelas reguler dengan pull out

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler/inklusif, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik/keluar dari kelas reguler/inklusif ke ruang bimbingan/ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari Guru Khusus/Guru Pembimbing Khusus.

4. Kelas reguler dengan cluster dan pull out

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler/inklusif dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik/keluar dari kelas reguler/inklusif ke ruang bimbingan/ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari Guru Khusus/Guru Pembimbing Khusus.

5. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar dan mendapat layanan bimbingan dari Guru Khusus/Guru Pembimbing Khusus di dalam kelas khusus pada sekolah reguler/inklusif; tetapi dalam bidangbidang tertentu dapat belajar bersama anak lain di kelas reguler/inklusif.

6. Kelas khusus penuh

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar dan mendapat layanan bimbingan dari Guru Khusus/Guru Pembimbing Khusus di dalam kelas khusus yang ada pada sekolah reguler/inklusif. Dalam model sekolah inklusif tersebut anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus tidak harus berada di kelas reguler/inklusif sepanjang hari untuk mengikuti semua mata pelajaran atau “inklusi penuh”; tetapi sebagian anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus dapat berada di kelas khusus/ruang sumber atau di ruang terapi untuk memperoleh bimbingan belajar dari guru khusus/guru pembimbing khusus, dan terapi dari terapis; karena jenis dan tingkat kelainan yang cukup berat.

Bagi anak berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus yang jenis dan tingkat kelainannya tergolong berat; memungkinkan untuk lebih banyak waktunya berada di kelas khusus /ruang sumber yang ada pada sekolah reguler/inklusif. Bagi anak berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus yang jenis dan tingkat kelainannya sangat berat, sehingga tidak memungkinkan belajar di sekolah reguler/inklusif dapat disalurkan ke sekolah



khusus atau yang disebut Sekolah Luar Biasa SLB atau Panti Rehabilitas/Sosial; dan atau sekolah rumah sakit “Hospital School”.

Sekolah Inklusif dapat memilih model mana yang akan diterapkan secara fleksibel; artinya suatu saat dapat berganti model; karena pertimbangan berbagai hal, tergantung pada hal-hal yang antara lain adalah sebagai berikut: (1) Jumlah anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus yang dilayani; (2) Jenis dan tingkat kelainan anak; (3) Ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) termasuk Guru Khusus/Guru Pembimbing Khusus; dan (4) Sarana dan prasarana yang tersedia.

B. Dukungan dalam Setiap Keragaman

Dalam pendidikan inklusif dikenal istilah dan konsep *children with special needs* (anak dengan kebutuhan khusus) atau *children with special educational needs* (anak dengan kebutuhan pendidikan yang khusus) istilah ini tidak bermaksud menggantikan istilah “anak cacat” atau “anak luar biasa” tetapi memiliki cara pandang yang lebih luas dan positif terhadap peserta didik atau anak yang memiliki kebutuhan yang sangat beragam.

Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus di sini adalah setiap kebutuhan yang ada kaitannya dengan pendidikan. Setiap anak dipandang mempunyai kebutuhan khusus baik yang permanen maupun yang temporer. Kebutuhan yang permanen adalah kebutuhan yang terus-menerus ada dan tidak akan hilang, misalnya pada anak yang memiliki kelainan penglihatan ia selalu menggunakan media membaca dengan huruf Braille (tulisan khusus

bagi tunanetra). Sedangkan kebutuhan yang bersifat temporer adalah kebutuhan yang bersifat sementara, misalnya anak yang tidak dapat berkonsentrasi karena ia sedang sedih, setelah penyebabnya hilang maka ia dapat berkonsentrasi kembali.

Ditinjau dari penyebab munculnya kebutuhan khusus tersebut dapat berasal dari diri sendiri maupun dari luar diri (lingkungan). Salah satu contoh penyebab munculnya kebutuhan khusus dari diri sendiri adalah kecacatan (disability). Sedangkan kebutuhan khusus yang berasal dari lingkungan misalnya anak mengalami kesulitan belajar karena tidak dapat berkonsentrasi dengan baik dan penyebabnya mungkin suasana tempat belajar yang tidak nyaman.

Di samping itu, kebutuhan khusus juga dapat dibedakan menjadi:

1. kebutuhan khusus umum
2. kebutuhan khusus individu
3. kebutuhan khusus kecacatan

Kebutuhan khusus umum adalah kebutuhan khusus yang secara umum dapat terjadi pada siapapun misalnya karena sakit tidak bisa belajar dengan baik. Sedangkan kebutuhan khusus individu adalah kebutuhan yang sangat khas yang dimiliki oleh seorang anak, misalnya seseorang tidak bisa belajar kalau tidak sambil mendengarkan musik. Kebutuhan khusus kecacatan adalah kebutuhan khusus yang ada akibat kecacatan, misalnya kebutuhan berbicara dengan bahasa isyarat dan artikulasi bagi anak tunarungu, kebutuhan pengajaran menolong diri sendiri pada anak tunagrahita. Sebagai upaya mendukung jalannya pendidikan



inklusif di sekolah, terdapat beberapa organisasi yang hendaknya turut berpartisipasi secara terorganisir sesuai dengan peran mereka, diantaranya yaitu:

1. Peran SLB

Selain fungsinya sebagai penyelenggara pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara segregasi, maka apabila SLB berperan sebagai pusat sumber, maka peran tersebut menjadi bertambah, diantaranya:

- a. Sosialisasi/advokasi/informasi/penerangan ke sekolah dan penyelenggara pendidikan non formal dan informal.
- b. Melaksanakan assesmen pada semua anak sekolah, luar sekolah, dan sekolah rumah.
- c. Memberikan layanan dan bimbingan kependidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
- d. Melakukan penjarangan anak berkebutuhan khusus.
- e. Melaksanakan pelatihan untuk persiapan pelaksanaan layanan pendidikan inklusif.
- f. Penelitian dan penelaahan tentang kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.
- g. Penelitian dan Pengembangan metoda dan strategi mengajar yang adaptip pada setiap individu Penelitian dan Pengembangan metoda dan strategi mengajar yang adaptip pada setiap individu
- h. Merencanakan dan melaksanakan jejaring yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

- i. Merencanakan dan melaksanakan lingkungan pendidikan yang ramah bagi setiap anak.
 - j. Merencanakan, membuat dan mengadakan berbagai alat bantu mengajar.
 - k. Mengadakan advokasi yang terus-menerus, melalui berbagai media.
 - l. Melakukan pelatihan profesional untuk Guru Pembimbing Khusus dan profesional lainnya.
 - m. Mengatur penempatan guru pembimbing khusus.
 - n. Pelatihan Vokasional dan penyalurannya.
2. Peran Perguruan Tinggi

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif memerlukan kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. Peran serta aktif dari masyarakat sangat diperlukan karena dalam era desentralisasi masyarakat dituntut untuk lebih aktif dalam mengembangkan segala potensi daerah termasuk dalam bidang pendidikan inklusif. Partisipasi masyarakat dimasa sekarang diarahkan tidak hanya dalam bentuk pendanaan, tetapi juga dalam bentuk sumbangan pemikiran dan ketenagaan.

Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pasal 11 dinyatakan bahwa Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan. Bantuan professional tersebut dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi berkewajiban memberikan dukungan dan ikut berperan aktif dalam implementasi pendidikan



inklusif, dalam upaya mewujudkan pendidikan untuk semua. Bentuk partisipasi dan peran Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif antara lain meliputi:

- a. Memberikan bantuan profesional dalam mengidentifikasi, mengembangkan instrument dan melakukan asesmen, menentukan jenis intervensi yang sesuai, mengembangkan layanan kompensatoris, dan layanan advokasi peserta didik.
- b. Memberikan bantuan profesional dalam pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.
- c. Memberikan bantuan profesional dalam peningkatan kualifikasi pendidikan, pengembangan kompetensi dan profesionalitas guru sekolah inklusif, terutama guru pendidikan khusus (GPK) yang bertugas sebagai pendamping guru kelas dan guru mata pelajaran dalam melayani anak berkebutuhan khusus.
- d. Memberikan bantuan profesional dalam pengembangan kompetensi dan profesionalitas pengawas sekolah inklusif, yang lebih berorientasi kepada pengawasan kinerja daripada pengawasan administratif.
- e. Memberikan bantuan profesional dalam mensosialisasikan konsep, penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif kepada para pembina dan pelaksana pendidikan di lapangan agar mereka memiliki persepsi yang sama, dalam

berbentuk seminar, workshops, diskusi-diskusi ilmiah, temu wicara, dan sebagainya.

- f. Memberikan pendampingan kepada sekolah-sekolah inklusif dalam penyelenggaraan pendidikan dan manajerial sekolah.
- g. Melakukan kerjasama dan membangun jaringan dengan pihak-pihak terkait dalam mendukung implementasi pendidikan inklusif di daerah.

3. Peran Organisasi LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non pemerintah (disingkat ornop atau ONP (Bahasa Inggris: non-governmental organization; NGO).

Menurut Instruksi Menteri dalam negeri nomor 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang dimaksud LSM adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Berdasarkan Undang-undang No.16



tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara umum organisasi non pemerintah di Indonesia berbentuk yayasan.

Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi non pemerintah bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi maupun negara. Pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam rangka mengembangkan, mendayagunakan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara swadaya dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan bertujuan agar keberadaan serta kegiatannya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan sejalan dengan pembangunan di daerah, dalam lingkup pembangunan nasional. Secara garis besar dari sekian banyak LSM atau organisasi non pemerintah yang ada dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Organisasi donor, adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain.
- b. Organisasi mitra pemerintah, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.
- c. Organisasi profesional, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti ornop pendidikan, ornop bantuan hukum, ornop jurnalisme, ornop kesehatan, ornop pengembangan ekonomi dll.
- d. Organisasi oposisi, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi

penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah.

C. Nilai Pembelajaran Ramah untuk Semua

Proses pembelajaran yang ramah itu esensinya pada seorang guru yang memahami setiap siswanya sebagai individu yang memiliki keunikan, kemampuan, minat, kebutuhan, dan karakteristik yang berbeda-beda. Pemahaman tersebut sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi semua anak.

Sebuah jawaban untuk menciptakan proses pembelajaran yang ramah adalah dengan mengadaptasi proses pembelajaran yang selama ini ada (konvensional) dengan kebutuhan setiap anak. Proses adaptasi ini berorientasi kepada pembelajaran yang senantiasa bertitik tolak pada anak (child center learning) tidak pada target silabus seperti pada Kurikulum Nasional yang harus dicapai.

Kurikulum yang digunakan diharapkan juga memberikan kesempatan dan peluang yang luas kepada guru untuk melakukan modifikasi dan penyesuaian yang diorientasikan terhadap kondisi masing-masing murid. Di samping itu terciptanya proses pembelajaran yang ramah memfokus pada active learning, artinya anak diberi keleluasaan untuk melakukan eksplorasi dan mendapatkan sumber-sumber informasi secara mudah serta lebih menekankan pada model kooperatif dan kreatif. Pembelajaran ini

juga mengakar dari landasan norma dan nilai yang jelas, yang berasal dari budaya yang dimiliki oleh anak bukan oleh orang dewasa dan ruang lingkup pembelajaran individual senantiasa memberikan kesempatan kepada anak bekerja berdasarkan pada tingkat kemampuan dan perkembangannya. Untuk itu, Sapon-Shevin (1994/1995) dalam Sunardi (2002) mengemukakan lima profil pembelajaran di sekolah inklusif:

1. Pendidikan inklusif berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Guru mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas yang menampung semua anak secara penuh dengan menekankan suasana dan perilaku sosial yang menghargai perbedaan yang menyangkut kemampuan, kondisi fisik, sosial ekonomi, suku agama, dsb.
2. Pendidikan inklusif berarti menerapkan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas. Mengajar kelas yang memang dibuat heterogen memerlukan perubahan kurikulum secara mendasar. Guru di kelas inklusif secara konsisten akan bergeser dari pembelajaran yang kaku, berdasarkan buku teks, ke pembelajaran yang banyak melibatkan belajar yang kooperatif, tematik, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan assessmen secara autentik.
3. Pendidikan inklusif berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif. Perubahan dalam kurikulum berkaitan erat dengan perubahan metode pembelajaran. Model kelas tradisional dimana seorang Guru secara sendirian berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan semua anak di

kelas, harus diganti dengan model murid-murid bekerja sama, saling mengajarkan dan secara aktif berpartisipasi dalam pendidikan sendiri dan pendidikan teman-temannya. Kaitan antara pembelajaran kooperatif dan kelas inklusif sekarang jelas; semua anak berada di satu kelas bukan untuk berkompetisi, tetapi untuk saling belajar dari yang lain.

4. Pendidikan inklusif berarti penyediaan dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi. Meskipun guru selalu dikelilingi oleh orang lain, pekerjaan mengajar dapat menjadi profesi yang terisolasi. Aspek penting dari pendidikan inklusif meliputi pengajaran dengan tim, kolaborasi dan konsultasi, dan berbagai cara mengukur keterampilan, pengetahuan, dan bantuan individu yang bertugas mendidik sekelompok anak. Kerjasama tim antara guru dengan profesi lain diperlukan, seperti para profesional, ahli bahasa, orthopedagog, konselor, dokter, psikolog, dsb.
5. Pendidikan inklusif berarti melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan. Pendidikan inklusif sangat bergantung kepada masukan orang tua pada pendidikan anaknya, misalnya keterlibatan mereka dalam penyusunan Program Pengajaran Individual.

Terlaksananya proses pembelajaran yang ramah ini salah satunya didasari oleh pelaksanaan assessmen yang terencana. Assessmen ini adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak, yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk



menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak dan sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran yang dimaksud adalah rancangan pembelajaran yang didesain sebagai rancangan pendidikan individual atau IEP (Individualized Educational Program) yaitu suatu dokumen tertulis yang memadukan individualisasi metode assessmen dengan individualisasi metode pengajaran.

Robb, Benardoni, dan Johnson (1972) dalam Robert M. Smith (1983) mengemukakan lima maksud utama yang mengarah kepada assessmen:

1. Untuk mengidentifikasi anak
2. Untuk membuat keputusan tentang penempatan pendidikan
3. Untuk merancang perencanaan individualisasi pendidikan
4. Untuk memonitor kemajuan anak secara individu
5. Untuk mengevaluasi keefektifan program

Idealnya assessmen ini dilakukan melalui kerjasama lintas sektoral dan multidisiplin. Selain didasari oleh pelaksanaan assessmen, proses pembelajaran yang ramah, perlu dilandasi juga oleh kurikulum yang fleksibel, dan pendekatan pembelajaran yang efektif.

Di dalam proses pembelajaran yang ramah bagi semua anak, kita harus memastikan bahwa kurikulum yang digunakan fleksibel dan responsive terhadap keberagaman kebutuhan semua peserta didik (ada penyesuaian terhadap tingkat dan irama perkembangan individu) dan tidak sebaliknya (Salamanca, 1994). Adanya keleluasaan yang mendorong guru berani melakukan modifikasi

terhadap materi, metode, maupun penilaian untuk memfasilitasi kebutuhan komunikasi, mobilitas, dan belajar anak, penilaian lebih terbuka dan menyangkut seluruh aspek kemampuan siswa serta menggunakan integrated subject curriculum.

Di negara kita, peluang yang ada pada saat ini untuk memodifikasi kurikulum cukup terbuka dengan akan diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), meskipun hal ini masih belum mampu memenuhi sebuah model kurikulum yang fleksibel. Meskipun demikian paling tidak elemen-elemen fleksibilitas sudah nampak, misalnya mengenai kebijakan nasional yang diharapkan hanya kompetensi dasar, sedangkan daerah bahkan termasuk sekolah diharapkan mampu merumuskan tuntutan kompetensi yang lebih spesifik dengan sistem evaluasi yang fleksibel.

Sistem evaluasi yang fleksibel memiliki dua model yaitu dengan tes yang skoringnya bisa kuantitatif dan kualitatif (portofolio), dan penerimaan siswa tanpa tes serta ujian dilakukan secara local bagi tingkat dasar dengan model sistem kenaikan kelas secara otomatis. Dengan demikian peluang ini bisa kita manfaatkan untuk menuju pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah bagi semua anak, karena proses pembelajarannya senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setiap anak.

Adapun desain pembelajaran yang dibutuhkan adalah yang mampu mengembangkan metode dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan anak, yang mana hal ini bisa diidentifikasi melalui proses observasi dan assessmen yang dilakukan sebelum, selama, ataupun sesudah proses pembelajaran. Pembelajaran



seharusnya muncul di dalam kelas dimanapun kelas itu berada dan bagaimanapun situasinya tanpa ada seorang individupun yang dirugikan. Dan untuk keperluan tersebut diperlukan beberapa pendekatan seperti berikut ini:

1. Pembelajaran yang aktif (*active learning*)

Model ini adalah model pendekatan yang memberi bantuan kepada anak untuk menemukan berbagai peluang belajar sebagai wahana bagi dirinya untuk memperoleh pengetahuan, misalnya: anak diberi kebebasan mengeksplorasi berbagai informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tema pembelajaran, baik melalui permainan, buku, majalah, surat kabar, ataupun pengalaman anak itu sendiri.

2. Tujuan-tujuan yang dinegoisasikan (*negotiation of objectives*)

Merupakan pendekatan yang memberi peluang terhadap setiap aktivitas pembelajaran didasarkan kepada minat dan perhatian dari setiap anak. Dalam hal ini siswa diobservasi dan diinterview, sehingga guru dapat menyesuaikan model pembelajarannya yang menyesuaikan antara tujuan pembelajaran dengan minat si anak tersebut. Sehingga rencana pembelajaran itu akan dirumuskan secara fleksibel.

3. Peragaan, Praktek, dan Umpan Balik (*demonstration, practice, and feedback*).

Merupakan pendekatan yang dapat memunculkan contoh-contoh model perilaku yang memberikan peluang kepada siswa untuk mencontoh dan sekaligus juga mendorong siswa untuk

meniru, menggunakan dan sekaligus memberikan tanggapan langsung terhadap contoh-contoh model tersebut.

4. Evaluasi yang berkelanjutan (*continous evaluation*)

Melalui pendekatan ini dapat mendorong kemampuan penelaahan dan perefleksian siswa terhadap pembelajaran yang mampu menggambarkan bagaimana siswa mampu melakukan pembelajaran dan hasilnya sejauh mana. Artinya ini merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan secara terus menerus dan tidak berhenti serta terfocus pada ujian akhir saja, namun semua proses dilihat secara seksama, sehingga guru memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi belajar siswa dari awal sampai akhir.

5. Pemberian *Support*

Sebuah pendekatan yang dapat menolong siswa untuk mampu mengambil berbagai resiko sebagai wujud tanggung jawab dari apa yang dia lakukan. Dengan demikian dia memiliki rasa percaya diri yang positif karena memperoleh dorongan yang positif pula. Dukungan ini harus diberikan dalam berbagai model dan bentuk, misalnya: materi pembelajaran yang cukup baik, lingkungan pembelajaran yang ramah, mudah dijangkau dengan fasilitas yang sangat aksesible, keikutsertaan pemerintah (perencana pendidikan), keterlibatan manajemen yang baik, penghargaan dan penggunaan budaya local dan masyarakat local serta dukungan program dari institusi pusat sumber. Dengan cara seperti ini diharapkan guru dan siswa tertolong untuk menurunkan masalah-



masalah belajar dan pembelajaran yang dihadapinya secara lebih efektif.

D. Menggerakkan Roda Pendidikan Inklusif

1. Guru Pendidikan Khusus

Guru pendidikan khusus adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi pendidik bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan kejuruan (Permendiknas No.32 Tahun 2008).

Diperlukan sebuah kemampuan menjalin hubungan personal antar pribadi dan keterampilan berkomunikasi seorang guru tentang bagaimana mengajar anak untuk belajar dalam kegiatan pembelajaran di kelas inklusi. Menurut Tarmansyah (2007), guru berperan memberikan instruksi dalam upaya mengembangkan pengetahuan pembelajar sesuai dengan latar belakang mereka. Hal yang paling utama dalam hal ini adalah keikutsertaan siswa dalam membangun kemampuan memaknai arti dari informasi yang diterimanya. Kemampuan seorang guru dalam berdialog dengan siswa mendorong terjadinya interaksi yang efektif.

Tinjauan kondisi psikologis anak berkebutuhan khusus yang begitu beragam dalam kelas inklusi akan sangat berpengaruh terhadap teknik yang digunakan guru dalam komunikasi verbal dan non verbal. Unsur-unsur komunikasi yang ada di dalamnya

dipengaruhi oleh gaya komunikasi yang diterapkan oleh guru kepada siswa. Tanggung jawab pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah terletak ditangan pendidik, yaitu guru ABK.

Guru ABK merupakan salah satu komponen pendidikan yang secara langsung mempengaruhi tingkat keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam menempuh perkembangannya. Guru ABK dituntut untuk memiliki kesabaran yang tinggi, kesehatan fisik dan mental yang baik dalam bekerja karena mereka melakukan tugas fungsional yaitu mengajar satu per satu siswanya dengan penuh kesabaran, melakukan tugas administrasi seperti membuat rapor, dan tugas struktural dalam organisasi sekolah.

Berbeda dengan guru di sekolah biasa, menjadi guru ABK merupakan "panggilan hati" karena tugasnya berat dan menuntut komitmen penuh. Guru ABK dituntut untuk mengabdikan seluruh kemampuan, kreativitas, keterampilan, dan pikirannya untuk mendidik anak-anak luar biasa. Anak-anak penyandang kelainan biasanya tidak responsif, menutup diri, bahkan menghindar dari orang lain, dihantui rasa malu dan frustrasi akibat kelainan yang disandangnya. Tanpa memiliki dedikasi yang disertai kesabaran dan kreativitas dalam mengembangkan pendekatan pendidikan yang menarik dan mengundang, maka guru ABK akan gagal dalam menjalankan tugasnya.



2. Guru Umum Sebagai Guru Pendamping

Guru pendamping memegang peranan penting dalam membantu tidak hanya pada perkembangan akademik tetapi juga non akademik, seperti perkembangan sosialisasi, komunikasi, perilaku, motorik dan perkembangan latihan keterampilan hidup sehari-hari. Peran guru pendamping (shadow teacher) juga yaitu memahami berbagai kesulitan belajar serta cara menangani anak berkebutuhan khusus dengan baik dan memungkinkan anak untuk menerima perhatian khusus yang anak butuhkan. Shadow teacher dilatih untuk membantu anak berinteraksi dengan orang lain dan membantu mereka agar dapat memahami pelajaran.

Beberapa peranan guru pendamping menurut Skjorten dkk (dalam Pengantar Pendidikan Inklusif, 2003) yaitu : (1) Mendampingi guru kelas dalam menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan materi belajar. (2) Mendampingi anak berkebutuhan khusus (special needs children) dalam menyelesaikan tugasnya dengan pemberian instruksi yang singkat dan jelas. (3) Memilih dan melibatkan teman seumur untuk kegiatan sosialisasinya. (4) Menyusun kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. (5) Mempersiapkan anak berkebutuhan khusus (special needs children) pada kondisi rutinitas yang berubah positif. (6) Menekankan keberhasilan anak berkebutuhan khusus (special needs children) dan pemberian reward yang sesuai dan pemberian konsekuensi terhadap perilaku yang tidak sesuai. (7) Meminimalisasi kegagalan anak berkebutuhan khusus (special needs children). (8) Memberikan pengajaran yang menyenangkan kepada anak berkebutuhan khusus

(special needs children). (9) Menjalankan individual program pembelajaran yang terindividualkan (PPI).

Dalam proses pembelajaran guru pendamping kepada anak berkebutuhan khusus memiliki strategi seperti berikut: dalam memberikan layanan khusus pada anak berkebutuhan khusus adalah guru pendamping harus bisa membuat anak tersebut merasa nyaman disekolah maupun dikelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Temuan penelitian tersebut sesuai apabila dihubungkan dengan pendapat Shevin (dalam Direktorat PLB, 2005: 7) mengemukakan lima profil pembelajaran di Sekolah inklusi, yaitu: pendidikan inklusi berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan.

Komunikasi dan kerjasama antara guru pendamping (*shadow teacher*), guru kelas, dan orang tua sangat penting agar tercipta hubungan yang bermakna guna memenuhi kebutuhan anak. Shadow teacher bekerjasama dengan guru wali kelas dan guru konselor dalam pelayanan siswa serta membantu memberikan para siswa dengan menanamkan tanggung jawab, mendorong kemandirian dan mendorong siswa dalam belajar. Di Amerika, para shadow teacher dipekerjakan oleh orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk dapat bekerja mendampingi anak mereka di dalam kelas selama pelajaran berlangsung. Guru Pendamping juga bertugas untuk melayani kebutuhan siswa yang mempunyai kekurangan fisik, mental, emosi maupun intelektual di sekolah inklusif sehingga potensi yang dimiliki mampu terlayani dengan maksimal.



Di samping itu, selain memiliki banyak kelebihan guru pendamping juga memiliki kekurangan. Masih ada guru pendamping yang kesulitan dalam mengatasi anak yang mempunyai gangguan autis. Seharusnya guru pendamping mengetahui keadaan atau karakteristik masing-masing anak autis dikelas, misalnya anak tersebut mempunyai karakteristik belajar yang sesuai dengan dirinya, setidaknya ia juga mengetahui gaya belajar individu autistik secara umum dan ciri khas anak yang ia dampingi pada khususnya. Guru pendamping harus mengetahui kebutuhan anak didiknya, agar anak memperoleh informasi yang diperlukan untuk dapat berpartisipasi di dalam kegiatan dikelas maupun diluar kelas.

Tapi kenyataannya ketika menyampaikan informasi tidak semudah yang dibayangkan. Guru pendamping masih kesulitan dalam menyampaikan informasi dikarenakan anak yang sangat hiperaktif, tidak bisa berkonsentrasi, dan kondisi emosional yang kadang berubah-ubah, sehingga guru pendamping harus memiliki kesabaran dan mencari cara untuk menghadapi anak autis. Meskipun masih ada kekurangan, guru pendamping ini sangat dianjurkan untuk membantu guru kelas dalam proses pembelajaran. Agar pembelajaran berjalan sesuai harapan.

3. Forum Guru Pendidikan Khusus

Forum merupakan tempat atau wadah untuk membicarakan kepentingan bersama atau tempat pertemuan dan bertukar fikiran antar pengguna. Forum ini merupakan tempat pengguna untuk mencari informasi yang relevan dan memberikan masukan-masukan sesama antar pengguna. Forum mempunyai aturan-aturan

di dalamnya agar pengguna bisa berbicara dengan sopan tanpa menyakiti hati pengguna lainnya, forum juga mempunyai administrator atau bisa juga disebut dengan moderator.

Forum diskusi merupakan tempat untuk memberikan pendapat atau mencari informasi yang lebih akurat dan saling berbagi antar pengguna forum, forum diskusi kelompok melibatkan lebih dari satu individu dalam berdiskusi dalam sebuah forum. Forum diskusi menurut Yani (2011) adalah, “Proses, pengetahuan, pembelajaran untuk memberikan arti internalisasi nilai-nilai kepada peserta diskusi atau melihat keadaan diskusi pada forum tersebut.”



DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhidin, et al. 2009. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Alimin, Zaenal. 2005. *Pengembangan Program Pembelajaran Individual Bagi Anak Tunagrahita*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Alwi, Syafaruddin. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi
- AM. Kadarman. 1996. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Amiruddin Siahaan, dkk. 2006. *Manajemen Pengawas Pendidikan*. Jakarta: Quantum Teaching
- Amka. 2020. *Manajemen Pendidikan Khusus*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center
- Baidhawiy, Zakiyuddin. 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Erlangga.
- Billingsley, Bonnie, dkk. 2018. Leadership for Effective Inclusive Schools: Considerations for Preparation and Reform. *Australasian Journal of Special and Inclusive Education*. 42(1), 65-81. doi 10.1017/jsi.2018.6
- Bobbit, Franklin. 1918. *The Curriculum: A Summary of The Development Concerning The Theory of The Curriculum*. Bontos: Houghton Mifflin

- Booth, Tony & Ainscow, Mel. 2002. *Index for Inclusion*. Centre for Studies on Inclusive Education
- Daniel P. Hallahan dkk.2009.*Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*. Boston: Pearson Education Inc.
- David, F.R. 2004. *Manajemen Strategis: Konsep. Edisi ketujuh*. Jakarta: PT.Prenhallindo
- Depdiknas. 2003. Undang-undang RI No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.2007. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat PLB. 2004. Buku Seri: Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Depdiknas
- John W. Santrock.2004.*Educational Psychology*.New York: The McGraw Hill Inc.
- Koesoema, Doni A., 2007. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak Di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.
- Komariah Aan & Chepi Triatna, *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, (Bandung: Bumi Aksara, 2006).
- Lickona, Thomas. 1991. *Educating for character: How our school can teach respect and responsibility*. New York: Bantam books.
- Luth Thohir, *Masyarakat Madani Solusi Damai dalam Perbedaan*, (Jakarta: Media Cita Jakarta, 2006), cet. V.
- M. Zainuddin, *Nilai-nilai Karakter dalam al-Tarbiyah ulu al-Albab, Living Values Education (LVE)*, dalam Rangka Penguatan



Pendidikan Karakter, Pembinaan SDM, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 21 Mei 2012.

Mahpudz, Asep M. Pengembangan Karakter Dan Kepribadian Mahasiswa Pada Pembelajaran Di Perguruan Tinggi, <http://menulisbersamaaswir.blogspot.co.id/2011/09>

Mansur Muslich, 2011. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, Bumi Aksara, Jakarta.

Masykuri H, *Pengamalan Budaya Agama (Religious Culture) di Sekolah Umum*, Jurnal Smart Kids. (Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, Dirjen PAI Departemen AGama RI tahun 2007).

Mehdi Golshani, *Filsafat-Sains Menurut al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2003).

Michele Borba, 2001. *Building Moral Intelligence: The Seven Essential Vitues That Kids to Do The Right Thing*

MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmn.2006. *Memahami dan Membantu Anak ADHD*.Bandung: PT. Refika Aditama.

O'Neil. 1995. *Can inclusion work (A Conversation with James Kauffman andMara Sapon-Shevin)*, Boston: E Educational Leadership.

Oetomo, Budi Sutedjo Dharma. (2002). *E-Education; Konsep, Teknologi, dan Aplikasi Internet Pendidikan*. Yogyakarta: Andi.

[Portalgaruda.org/article.php?article=252714&val=6813&title=Pen didikan Inklusif di Indonesia](http://Portalgaruda.org/article.php?article=252714&val=6813&title=Pen%20didikan%20Inklusif%20di%20Indonesia)

- Praherdhiono, Henry Dan Setyosari, Punaji. (2006). *Teori Dan Aplikasi: Sistem Online dalam Pembelajaran*. FIP Universitas Negeri Malang
- Pusat Kurikulum, (2002), *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Balai Penelitian dan Pengembangan.
- Rasyidi, Imron. 2009. *Pendidikan berparadigma Inklusif*. Malang: UIN-Malang Press.
- Rasyidin,W (2007), *Filsafat Pendidikan*, Bandung : Pedagogiana Press
- Razak, Usron dkk. 2001. *Pendidikan Agama*. Jakarta: UHAMKA Press.
- Stubbs, Sue. 2002. *Terjemahan (Inclusive Education, Where There Are Few Resources)*. Norway: the Atlas-Alliance.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (SK Mendiknas) No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- Sutisna, Oteng. 1985, *Administrasi Pendidikan, Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*. Bandung: Angkasa.
- Tarmansyah.2007. *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Depdiknas.
- Terry, George R. Winardi. 1986. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Alumni
- Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan.1989. *Administrasi Pendidikan*. Malang: FIP IKIP Malang



Tyler, Ralph W. 1957. *Basic Principles of Curriculum and Instruction: Syllabus for Education 360*. Chicago: University of Chicago Press

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

Watkins, Amanda & Ebersold, Serge. Efficiency, Effectiveness and Equity within Inclusive Education Systems. *Implementing Inclusive Education*. 8(1), 229-259.
<http://dx.doi.org/10.1108/S1479-363620160000008014>

PROFIL PENULIS



Dr. H. Amka, M.Si, seorang praktisi pendidikan ini dilahirkan di Kotabaru Kalimantan Selatan, 7 Maret 1962. Menempuh pendidikan sarjana (S-1) di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Pakar pendidikan karakter ini melanjutkan kuliah jenjang strata dua (S-2) pada Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta. Gelar Doktor bidang Ilmu Administrasi diperoleh dari Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya. Saat ini ia menjadi dosen Prodi Pendidikan Khusus di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Menulis menjadi kegemaran tersendiri bagi pria yang menekuni kajian pendidikan karakter ini. Beberapa karya yang sudah diterbitkan antara lain: (1) Hati Pusat Pendidikan Karakter, 2012, (2) Karakter Guru Profesional, 2012, (3) Meletakkan Pondasi Usia Emas Anak Indonesia, 2013, (4) Membangun Kecerdasan Karakter Anak Usia Dini, 2013, (5) Membudayakan Pendidikan Karakter Melalui Olah Raga Tenis Meja, 2015, (6) Mutiara Pendidikan Karakter, 2015, (7) Membumikan Al-Qur'an di Sekolah, 2016, (8) Buku Ajar Belajar dan Pembelajaran, (9) Media Pembelajaran Inklusi, 2018, (10) Penguatan Pendidikan Karakter, 2019, (11) Filsafat Pendidikan, 2019, (12) Manajemen Sarana Sekolah Penyelenggara Inklusi, 2020, (13) Profesi Kependidikan, 2020.